

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROYEK PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP) DALAM PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA BARANGKA KECAMATAN**

KAPONTORI

KABUPATEN BUTON



**TAPM Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister
Administrasi Sains Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh:

AMIRUDDIN

NIM : 014966179

POGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2012

ABSTRAK

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROYEK PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP) DALAM PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA BARANGKA KECAMATAN
KAPONTORI
KABUPATEN BUTON
AMIRUDDIN
UNIVERSITAS TERBUKA

Amiruddin @ mail.yahoo.ut.co.id

Kata kunci, Peningkatan, kesejahteraan masyarakat,

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana efektifitas pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan faktor faktor yang mempengaruhinya? Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran secara nyata dan lebih mendalam terhadap keefektifan pelaksanaan program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di sebuah desa pada lingkup Pemda Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni secara lebih mendetail menguraikan tentang efektifitas pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) berdasarkan temuan di lapangan serta menggunakan analisis sumber data yang diperoleh dari hasil observasi, catatan-catatan, dokumen dan laporan serta hasil wawancara dengan masyarakat sasaran program, pengurus, aparat desa setempat maupun informasi lainnya dengan menggunakan teknik pengambilan data lewat penyebaran kuesioner (angket) dan interview (wawancara).

Subyek penelitian ini adalah masyarakat Desa Barangka Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara. Penelitian ini di laksanakan di Desa Barangka Kecamatan Kapontori yaitu pada masyarakat Desa Barangka yang telah menerima bantuan dana maupun pengadaan serta pembinaan dari Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya bantuan baik dana, pengadaan maupun pembinaan dari Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) telah terjadi perbedaan tingkat pendapatan berkisar antara 80% sampai 100% dari sebelum dan setelah menerima bantuan atau lebih spesifik lagi masyarakat miskin telah memiliki modal usaha sebagai penopang kehidupannya.

Sebagai kesimpulan, penelitian ini membuktikan bahwa Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dinyatakan sudah efektif dalam meningkatkan taraf hidup. Meningkatnya kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari berarti pula kehidupan mereka telah berubah kearah peningkatan kesejahteraan.

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION DEALING WITH
POVERTY PROJECT IN URBAN AFFAIR IN IMPROVEMENT SOCIETY
WELFARE IN BARANGKA VILLAGE, KAPONTORI DISTRICT OF BUTON
REGENCY
AMIRUDDIN
UNIVERSITAS TERBUKA
Amiruddin @ mail.yahoo.ut.co.id

Key words: improvement, society welfare

This research was done to investigate how was the effectiveness of the implementation dealing with poverty project in urban affair to improve the society welfare and their influence factors? This research was intended to know the real description and more detail concerning the effectiveness of the implementation dealing with poverty project in urban affair in a village on the scope of Buton local government South East Sulawesi province in improvement their society welfare.

This research used the qualitative descriptive method in a more detail manner about the effectiveness of the implementation dealing with poverty project in urban affair to improve the society welfare and used analyze the data source that was obtain from the outcome of observation, notes, document, report, and the result of interview with society with the manager of village officer as target and also other information used by taking data technique obtained questionnaire and interview

The research subjects were poor society of Barangka village, Kapontori district of Buton regency South East Sulawesi. The samples of this research were poor society of Barangka village who received the aid of financial support, provision and establishment dealing with poverty project in urban affair.

The result of this research show that provided financial support, provisioning and establishment from dealing with poverty project in urban affair had happened the differentiate with their income level from about 80% up to 100% before and after they receive the aid or more specific poor society was had their own capital effort as the support of their life.

As the summary of this research establish that dealing with poverty project in urban affair was asserted effective in increase the standard of living. The improvement of society ability in fulfill their daily needs. It also meant that their life has changed toward welfare improving.

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul **Efektifitas Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Barangka Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton.** adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Kendari, 7 Februari 2012
Yang menyatakan,



**AMIRUDDIN
NIM. 014966179**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
Jl.Cabe Raya.Pondok Cabe.Ciputata.15418
Telp.021.7415050.Fex,021.7415588.

**SURAT PERNYATAAN PERBAIKAN
DAN PENYERAHAN NASKAH TAPM**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AMIRUDDIN
NIM : 014966179
Program Studi : Administrasi Publik

Judul TAPM : **Efektifitas Pelaksanaan Proyekt Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Dalam Peningkatan
Kesejahteraan Masyarakat di Desa Barangka
Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton.**

Dengan ini menyatakan telah memperbaiki naskah TAPM menurut format PPs UT dan bersama ini saya menyerahkan hasil perbaikan kepada Direktur PPs UT selaku Panitia Ujian Sidang .

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terimakasih.

Kendari,.....2012

Mengetahui

Kepala UPBJJ-UT Kendari

Drs. Wawan Kuswanto, M.Si
NIP.19630715/199103 1 006

Mahasiswa

Amiruddin
NIM.014966179

Ketua Bidang Ilmu Program Magister Administrasi Publik

Dra. Susanti, M.Si
NIP.1967214 199303 2 002

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : **Efektifitas Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Barangka Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton**

Penyusun TAPM : Amiruddin

Nim : 014966179

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Hari / Tanggal :

Menyetujui

Pembimbing II



Dr. Hasanuddin Bua, SE, Ms
NIP.

Pembimbing I



Prof. Dr. Wemoy Banga, M. Si
NIP.

Mengetahui :

Ketua Bidang ISIP,
Program Magister Administrasi Publik



Dra. SUSANTI, M. Si
NIP. 19671214199303 2 002

Direktur Program Pascasarjana



SUCIATI, Ph.d
NIP. 19520213 198503 2 001



UNIVERSITAS TERBUKA

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : AMIRUDDIN
NIM : 014966179
Program Studi : Administrasi Publik
Judul TAPM : **Efektifitas Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Barangka Kecamatan Kapontori Kabupaten Buan.**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana, Program Magister (TAPM) Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :

Hari / Tanggal : Jum'at, 13 April 2012

Waktu : 13.00-15.00 WITA

Dan telah dinyatakan **LULUS**

Panitia Penguji TAPM


Ketua Komisi Penguji : Prof.Dr. Udin S.Winataputra/UW


(.....)

Penguji Ahli : Dr.Djaka Permana. M.SI/DP


(.....)

Pembimbing I : Prof. Dr. WEMPY BANGA, M.Si


(.....)

Pembimbing II : Prof. Dr. HAS/NUDDIN BUA, SE, Ms.(.....)


(.....)

KATA PENGANTAR

Ketika masyarakat dunia ini berkembang secara timpang, ide untuk menyamakan kedudukan yang sederajat antara satu dengan yang lain menjadi perhatian para ilmuwan maupun penentu kebijakan. Kepentingan itu dipotret sebagai sebuah ketidak-adilan dan ketidak manusiwan, yang diciptakan oleh struktur masyarakat dunia. Pada suatu pihak masyarakat belahan dunia berkembang sangat maju, akan tetapi pada pihak lain sebageian besar masyarakat dunia itu tinggal dan bahkan dianggapnya sangat terkebelakang.

Dikotomi inilah kemudian melahirkan banyak pandangan para teoritis tentang bagaimana merubah masyarakat dari posisi yang dianggapnya terkebelakang untuk menjadi masyarakat yang dianggapnya maju. Semua itu adalah pengakuan para “cerdik pandai” meskipun masyarakat yang dianggapnya terkebelakang tidak pernah mendefinisikan dirinya sebagai masyarakat yang terkebelakang. Oleh sebab itu, dikalangan negara-negara sedang berkembang tersebut banyak dilakukan usaha untuk mengejar ketertinggalannya. Salah satu bentuknya adalah melalui proses perubahan sosial terencana guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, yang kemudian dikenal sebagai pembangunan masyarakat.

Fenomena tersebut secara umum dijumpai di negara-negara sedang berkembang sejak dekade 1950-an. Walaupun secara operasional setiap negara menerapkan strategi dan metode sesuai dengan kondisi, potensi sumberdaya dan orientasi kebijakan masing-masing, secara umum dapat diidentifikasi sebagai strategi primadona dan menjadi arus besar di banyak negara yang sedang berkembang

pada era tertentu. Indonesia yang dilanda krisis moneter beberapa tahun belakangan ini yang menyebabkan bertambahnya jumlah keluarga miskin, sehingga penanggulangannya memerlukan kearifan dari seluruh pihak baik pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya.

Untuk itu penulis merasa perlu untuk mengangkat permasalahan ini untuk dikaji secara komprehensif dengan Judul **Efektifitas Pelaksanaan Program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Barangka Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton** dan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Universitas Terbuka UPBJJ Kendari.

TAPM dibimbing oleh Prof.Dr.Wempy Banga, M.Si sebagai Pembimbing 1 dan Dr. Hasanuddin Bua. SE, Ms sebagai pembimbing 2, namun penulis sadar bahwa apa yang diharapkan dalam penulisan ini masih sangat jauh dari kesempurnaannya. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membantu penyempurnaan penulisan ini sangat diharapkan, sehingga penulisan TAPM ini dapat bermanfaat bagi kepentingan Pihak Akademik, Pemerintah maupun masyarakat luas, sehingga penuntasan kemiskinan yang diharapkan dapat segera terselesaikan.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Rektor Universitas Terbuka Prof. DR.Ir.Tian Belawati, M.Ed, P.Hd;
- (2) Kepala UPBJJ UT Kendari Drs. Wawan Ruswanto, M.Si;
- (3) Bupati Buton, Ir.H. La Ode Safei Kahar, M.Si dan Wakil Bupati Buton Ali La Opa,SH
- (4) Kepala Kantor Badan Kesatuan bangsa, politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Buton
- (5) Camat Kapontori Drs. Harsila

- (6) Kepala Desa Barangka Sahidin R.
- (7) Seluruh tenaga edukatif dan administratif dalam lingkup Program Magister Administrasi Publik UT UPBJJ Kendari;
- (8) Seluruh warga desa Barangka yang telah memberikan informasi demi tercapainya penulisan ini.
- (10) Istri tercinta yang telah banyak memberikan dorongan serta motivasi untuk mengikuti Program Pasca Sarjana (S2) dan terselesaikannya Tugas Akhir Program Magister ini, juga teman-teman sejawat yang telah banyak memberikan masukan, dan bimbingan serta pihak-pihak lain yang secara aktif berpartisipasi memberikan dukungan demi kesempurnaan penulisan ini semoga seluruh kebaikan dari semua pihak mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah “Amin”

Penulis

A M I R U D D I N

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II Tinjauan Pustaka	10
A. Kajian Teoritis.....	10
1. Konsep efektifitas.....	10
2. Efektifitas pelaksanaan program.....	10
3. Peningkatan kesejahteraan.....	14
4. Penyebab kemiskinan dan penanggulangannya.....	19
5. Pemberdayaan masyarakat.....	23
6. Strategi Pemberdayaan Masyarakat.....	26
B. Kerangka Berpikir.....	31
1. Efektifitas pelaksanaan program	31
2. Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan	31
3. Peningkatan kesejahteraan.....	32
4. Masyarakat.....	34
C. Definisi Konsep Dan Operasional	35
1. Efektifitas Pelaksanaan Program.....	35
2. P2KP.....	35
3. Peningkatan kesejahteraan.....	36
D. Konsep Kunci.....	38

BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Desain Penelitian	41
C. Lokasi Penelitian	41
D. Instrumen Penelitian.....	41
E. Prosedur Pengumpulan Data.....	42
F. Proseduru Analisis Data.....	45
 BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Gambaran umum Desa Barangka Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton.....	50
1. Kondisi Geografi.....	50
2. Struktur organisasi Desa Barangka.....	50
3. Keadaan Penduduk	51
4. Keadaan sarana dan prasarana.....	57
B. Tahapan Keluarga Sejahtera.....	61
C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan P2KP.....	79
1. Sosialisasi Program P2KP	84
2. Partisipasi Masyarakat Dalam Program P2KP	86
3. Kelembagaan Masyarakat Yang Efektif.....	86
4. Kemudahan Dalam Memperoleh Bantuan	87
5. Kesadaran Masyarakat.....	87
D. Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) Desa Barangka Kecamatan Kapontori	89
1. Bidang Ekonomi.....	90
2. Bidang Sosial.....	99
 BAB V SIMPULAN DAN SARAN.	115
A. SIMPULAN	115
B. SARAN.....	116
 DAFTAR PUSTAKA.....	119

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Skema Hubungan Variabel.....	30
Gambar/Foto 4.4. Kios Yang Mendapat Bantuan Dana Bergulir P2KP.....	91
Gambar/Foto 4.6. Areal Budi Daya Agar-agar Warga Miskin Yang Mendapat Bantuan Dana Bergulir P2KP.....	95
Gambar/Foto 4.7. Hasil budi daya agar-agar warga miskin yang mendapat Bantuan P2KP.....	96
Gambar/Foto 4.8. MCK Yang Dibangun Oleh P2KP Yang Diperuntukan Bagi Warga Miskin	101
Gambar/Foto 4.9. MCK Yang Dibangun Oleh P2KP Yang Diperuntukan Bagi Warga Miskin Namun Tidak Berfungsi Sebagai Mana Mestinya	102
Gambar/Foto 4.10. Perumahan Warga Miskin Yang Mendapat Bantuan Dana Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni P2KP.....	105
Gambar/Foto 4.11. Sarana Jalan Lingkungan Yang Dibuat Oleh P2KP Yang Diperuntukan Bagi Warga Miskin.....	106
Gambar/foto 4.12. Sarana Lampu Penerang Lingkungan.....	109
Gambar/Foto 4.13. Bak Penampung Air Bersih Yang Dibangun Oleh P2KP Yang Diperuntukan Bagi Warga Miskin.....	112

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Skenario Pengumpulan Data	40
Tabel 3.2. Daata Perangkat Desa,Pengurus P2KP.....	42
Tabel 3.3. Data Penerima Bantuan Menurut Kegiatan P2KP....	44
Tabel 3.4. Responden Menurut Jumlah KK Penerima Bantuan P2KP	45
Tabel 4.5. Jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin.....	52
Tabel 4.6. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian	53
Tabel 4.7. Tingkat pendidikan	56
Tabel 4.8. Kondisi sarana ibadah dan pendidikan Desa Barangka	57
Tabel 4.9. Sarana kesehatan dan air bersih	58
Tabel 4.10. Sarana sosial/lingkungan	59
Tabel 4.11. Jenis/macam sarana transportasi	61
Tabel 4.12. Tahapan keluarga sejahtera Desa Barangka	63
Tabel 4.13. Warga miskin yang mendapat masalah kesehatan	67
Tabel 4.14. Warga miskin yang mendapat masalah ekonomi	69
Tabel 4.15. Warga miskin yang mendapat masalah lingkungan.....	71
Tabel 4.16. Daftar warga miskin sasaran P2KP Desa Barangka Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton tahun 2007.....	73
Tabel 4.17. Program kerja P2KP Desa Barangka tahun 2007 s/d 2008.....	76
Tabel 4.18. Proyek yang dilaksanakan P2KP Desa BarangkaKecamatan Kapontori.....	77
Tabel 4.19. Perubahan tingkat pendapatan warga penerima bantuan dana bergulir bidang usaha jual beli perbulan.....	93
Tabel 4.20. Warga penerima bantuan dana bergulir budi daya agar-agar pendapatan tambahan perbulan	98

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pernyataan.....	123
2. Biodata	124
3. Pedoman Wawancara.....	125
4. Matriks Hasil Wawancara.....	126
5. Peta Desa Barangka	127
6. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Barangka.....	128
7. Peta Rencana Pembangunan Lingkungan	129
8. Peta Sebaran Penduduk Miskin.....	130
9. Peta Fisik MCK.....	131
10. Peta Fisik Jalan Lingkungan	132
11. Peta Fisik Bak Penampungan Air Bersih.....	133
12. Permohonan Izin Penelitian UT	134
13. Izin Penelitian Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat(KESBANG).....	135
14. Izin Penelitian Camat Kapontori.....	136

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teori pembangunan dalam perkembangannya menjadi semakin kompleks. Dinamika pembangunan tersebut tidak terlepas dari pemahaman terhadap konsep pembangunan yang bersifat terbuka. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa implementasi konsep pembangunan ternyata telah banyak merubah kondisi kehidupan masyarakat. Pada sebagian komunitas, pembangunan telah mengantarkan kehidupan mereka menjadi lebih baik bahkan ada sebagian yang dapat dikatakan berlebihan, sementara bagi komunitas lainnya pembangunan justru mengantarkan mereka kepada kondisi yang menyengsarakan. Oleh sebab itu, usaha kerja sama dalam hal kemasyarakatan mempunyai sifat untuk sesuatu hal atau bagi sekelompok orang tertentu.

Banyak kalangan melihat kondisi perkembangan tersebut sebagai realitas yang berbeda dengan perkembangan masyarakat yang tidak mengalami masa penjajahan, bahkan dipihak lain orang menyebutnya sebagai kondisi yang tidak normal. Krisis moneter yang melanda bangsa Indonesia beberapa waktu yang lalu menimbulkan dampak sosial dari berbagai segi misalnya semakin bertambahnya rakyat miskin sebagaimana didokumentasikan oleh berbagai media masa. Berdasarkan hasil pengamatan menunjukkan bahwa angka kriminalitas cukup tinggi, jumlah anak jalanan semakin banyak, penjarahan serta bentuk persoalan sosial lainnya. Untuk mengantisipasi hal itu pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan publik dalam memecahkan persoalan yang terjadi di masyarakat. Salah satunya dengan meluncurkan Bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Undang-Undang (UU) No.32 tahun 2004 adalah jawaban atas

tuntutan atau desakan desentralisasi dari pusat kedaerah. Otonomi daerah menjadi landasan hukum bagi setiap daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Dwiyanto, (2003:19) mengatakan bahwa salah satu rasionalitas yang penting dari pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk memperbaiki kinerja pemerintahan Kabupaten dan Kota. Dengan adanya otonomi Kabupaten dan Kota mempunyai kewenangan untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan daerah. Pemerintah Kabupaten dan Kota diharapkan lebih responsif dalam menanggapi berbagai permasalahan di daerahnya sehingga pelaksanaan pembangunan lebih efektif sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di daerah. Dengan kondisi seperti ini Pemerintah Kabupaten dan Kota akan lebih mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Pengentasan kemiskinan menjadi perhatian utama pemerintah daerah mengingat upaya percepatan pembangunan ekonomi yang sedang dilaksanakan. Sejalan dengan upaya percepatan pembangunan ekonomi maka pemerintah, swasta serta lembaga sosial lainnya telah menyusun program-program pembangunan yang dapat menyentuh kehidupan masyarakat miskin secara merata mulai dari Jaring Pengaman Sosial (JPS), pelaksanaan padat karya hingga pelaksanaan pemulihan masyarakat atau *community recovery plan* (CRP). Agar pelaksanaan program kena tepat pada sasaran, maka yang dapat dilakukan adalah memberikan sentuhan langsung kepada masyarakat miskin sebagai upaya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Persoalannya adalah banyak pengurus yang terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan di Indonesia tidak mempunyai pemahaman yang utuh tentang kemiskinan itu sendiri. Ketidak-tahuan dan kurangnya pemahaman tentang

perencanaan dan konsep penanggulangan kemiskinan tersebut menjadikan program-program yang ditujukan ke masyarakat menjadi tidak tepat sasaran. Salah satu program yang dijalankan yakni Jaring Pengaman Sosial (JPS) misalnya, tidak tepat sasarannya karena lebih mengarah kepada kelompok masyarakat miskin baru, tidak adanya tujuan yang jelas dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, sehingga upaya pemberdayaan masyarakat justru malah mematikan keswadayaan masyarakat serta partisipasi bermuatan politik, dan menambah utang bagi masyarakat, Sumodiningrat dalam Mubyarto, (2000:28).

Pelaksanaan pengentasan kemiskinan sesungguhnya merupakan sesuatu yang pragmatis, terlebih lagi apabila pendefinisianya harus diikuti dengan indikator untuk mengukur secara kuantitatif kelompok masyarakat atau individu mana yang dimasukan dalam kategori miskin. Para ahli banyak mencoba untuk merumuskan beberapa indikat sehingga mendapatkan satu rumusan yang tepat tentang siapa yang dianggap sebagai penduduk miskin. Chamber, (1987:140) mendeskripsikan dua macam situasi kemiskinan yaitu; pertama, kemiskinan kelompok masyarakat secara keseluruhan disebabkan oleh perbedaan yang jauh terpencil atau tidak memadai sumberdaya atau karena kedua-keduanya. Kedua, suatu keadaan masyarakat yang di dalamnya terdapat ketimpangan yang mencolok antara orang-orang kaya dan orang miskin.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas jelas bahwa persoalan kemiskinan mempunyai banyak dimensi dan sangat situasional serta subyektif sifatnya. Kemiskinan memang dapat diukur dari sisi ekonomi, akan tetapi masih banyak sisi atau dimensi lain yang dapat dipakai sebagai ukuran indikator misalnya non ekonomi (sosial, budaya, politik).Nugroho, (1995:31). Oleh karena itu, berkaitan dengan hal tersebut di atas secara sengaja melihat kemiskinan dengan menggunakan

Istilah "*Plural poverty*" bahwa situasi kelompok masyarakat sangat berbeda-beda. Sekelompok orang miskin kekurangan sandang tetapi mempunyai cukup pangan atau papan, sementara kelompok lain kurang modal tetapi cukup pangan atau kebutuhan dasar lain. Kemiskinan absolut dapat terjadi apabila individu atau satu kelompok mengalami kekurangan dalam segala hal sehingga bantuan dalam bentuk apapun akan diperlukan.

Konsekuensi dari konsepsi tersebut adalah pemberian bantuan pada masyarakat miskin perlu ekstra hati-hati, sehingga apa yang telah dirumuskan secara seksama dapat terlaksana dengan baik. Pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran adalah akibat dari perencanaan yang tidak efektif. Oleh karena itu, penentuan kelompok atau individu yang miskin dilakukan secara bersama-sama sehingga jelas situasi dan kondisi masyarakat yang sebenarnya baik kondisi sosial maupun keadaan wilayahnya.

Berbagai persoalan yang berkaitan dengan persoalan penanggulangan kemiskinan telah banyak dilakukan oleh pemerintah, baik melalui Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) maupun berbagai kelompok masyarakat lainnya. Khususnya sejak krisis ekonomi tahun 1998 yang lalu, berbagai program telah dikembangkan untuk mengatasi persoalan kemiskinan yang semakin bertambah. Namun demikian banyak kelemahan dari program yang pernah diluncurkan, paling tidak terdapat enam kelemahan penting; *Pertama*, pelaksanaannya cenderung bersifat jangka pendek, misalnya pembagian sembako. *Kedua*, pemilihan kelompok sasaran sering kurang tepat. Kerap kali terjadi kecurangan yang dilakukan pada saat pemilihan kelompok sasaran oleh pihak yang tidak sepenuhnya mengetahui situasi dan kondisi masyarakat miskin, sehingga pemberian bantuan diberikan pada kelompok yang tidak seharusnya menerima. *Ketiga*, implementasi perencanaan lebih

berorientasi pada satuan-satuan administrasi (desa, kelurahan, RT, RW). Banyak kelompok miskin yang tidak tergabung dalam unit-unit usaha yang sangat dinamis dan tidak didasarkan pada satuan wilayah administrasi tertentu misalnya pedagang kaki-lima, buruh gudang, anak jalanan, pengemis, dan lain-lain. *Keempat*, program yang dilaksanakan cenderung merupakan proses penguatan kelompok-kelompok swadaya yang sebelumnya telah ada dan memerlukan bantuan. *Kelima*, dalam pemanfaatan program-program tersebut dilakukan oleh Pemerintah namun tidak melibatkan kelompok-kelompok masyarakat, khususnya pelaksanaan pemberian bantuan yang dilakukan sebelum reformasi cenderung diimplementasikan memanfaatkan struktur birokrasi pemerintah yang cenderung tidak efektif. *Keenam*, dalam merumuskan pelaksanaan pemberian bantuan cenderung tidak menyertakan partisipasi dan peran aktif dari kelompok sasaran. Kondisi semacam ini tentu menjadikan efektifitas suatu perencanaan bantuan tidak dapat tercapai. Bakti Setiawan (2001), dalam *Media Partisipatif* (12-13).

Keenam kelemahan tersebut dapat disimpulkan efektifitas pelaksanaan Proyek Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dalam rangka menanggulangi kemiskinan selama ini cenderung tidak efektif sebab masih banyak masyarakat yang tidak disentuh akibat pendataan yang tidak sesuai aturan yang telah ditentukan. Secara umum pelaksanaan penanggulangan kemiskinan selama ini kurang efektif dilakukan di Indonesia umumnya dan khususnya di Desa Barangka Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara. Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dikembangkan sebagai salah satu alternatif karena perencanaannya berpijak dari konsep "*empowermen*" yang menekankan pada perlunya penanggulangan kemiskinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada prakteknya, perencanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) menerangkan pentingnya proses pembangunan kapasitas institusi lokal (local building) yang di dalamnya ada partisipasi aktif masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sebagai inti dan penggerak sekaligus agen sosial pembangunan di masing-masing komunitas melalui pembentukan kelompok swadaya masyarakat dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) mencoba membangun dan memperkuat institusi komunitas masyarakat lokal agar dalam jangka panjang dapat menjadi agen perubahan sosial masyarakat yang efektif. Dengan kata lain Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan dengan mencoba mengembangkan istilah yang disebut sebagai *social capital* atau modal sosial komunitas agar dalam jangka panjang mampu menjadi penggerak komunitas tersebut.

Secara realitas sosial, kemiskinan dikategorikan sebagai salah satu bentuk masalah sosial. Banyak pihak beranggapan, masalah-masalah sosial terjadi karena adanya suatu yang tidak benar dalam proses kehidupan sosial. Fenomena kemiskinan di suatu wilayah juga disebabkan oleh ketiadaan atau kurangnya sumberdaya alam di kawasan tersebut. Tidak jarang terjadi, mayoritas penduduk suatu kawasan berada dalam kondisi miskin disebabkan oleh kawasan tersebut memang sangat sedikit menyimpan sumberdaya alam. Seperti halnya Desa Barangka Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton merupakan wilayah pesisir dan kawasan perbukitan dimana sumber alamnya sangat kurang, sehingga penduduknya harus hidup dengan mata pencaharian utama sebagai nelayan dan budidaya agar-agar/rumput laut, pedagang pengecer atau kios dan sebagian lagi memilih keluar daerah (merantau) atau mencari nafkah ke daerah lain. Akibat krisis moneter yang

membuat lumpuhnya seluruh sendi kehidupan masyarakat termasuk masyarakat Desa Barangka sehingga pemerintah bermaksud untuk mengalokasikan dana bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di wilayah tersebut yang mana masyarakatnya sebagian besar masih tergolong keluarga sejahtera satu dan sejahtera dua sesuai daftar warga miskin Desa Barangka yang berjumlah 190 KK tahun 2007 s/d 2008.

Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sbeleum sepenuhnya menyentuh seluruh warga miskin sebab dana Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sangat terbatas sehingga sebagian program kerja proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) tidak dapat dilaksanakan untuk itu pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) belum dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan.

Warga miskin penerima bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) adalah masyarakat yang mempunyai mata pencaharian sebagai petani, pedagang dan nelayan tradisional dimana masih mangandalkan faktor alam sebagai sumber pendapatan yang diharapkan untuk dapat menopang kehidupan sehari-hari sehingga faktor alam sangat menentukan besar kecilnya pendapatan/penhasilan setiap hari. Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dapat merubah semuai hal tersebut di atas, warga masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan mukai beralih seperti pedagang dan petani agar-agar sebagai mata pencaharian utama, serta bentuk bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) laiannya sebagai penunjang yang manfaatnya sangat dirasakan oleh warga miskin penerima bantuan khususnya maupun masyarakat pada umumnya hasilnya sangat membantu sehingga polah

hidup masyarakat penerima bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) menunjukkan arah yang lebih baik.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana dijelaskan di atas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektifitas pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Barangka Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Barangka Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis dan menjelaskan efektifitas pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Barangka Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton.
2. Menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Desa Barangka Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diharapkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoritis yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan konsep tentang Efektifitas Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Barangka Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton.
2. Manfaat Praktis penelitian ini adalah memberi masukan kepada para pengambil keputusan khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Buton bahwa pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) perlu mempertimbangkan aspek-aspek efektifitas pelaksanaannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Barangka Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritik

1. Konsep Efektifitas

Untuk memperjelas makna Konsep efektifitas pelaksanaan program bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan harapan dalam penelitian ini maka diperlukan beberapa pendapat para ahli sebagai berikut:

Efektifitas adalah pencapaian keberhasilan dalam pelaksanaan pendayagunaan potensi baik berupa pemanfaatan sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia. Dilihat dari pengembangan sumberdaya manusia, masalah kemiskinan dilihat dari dua hal Tjitoherijanto, (1987:78).

”Pertama, masih belum berkembangnya sumberdaya manusia yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan serta belum memadainya penyediaan fasilitas kehidupan. Kedua masih belum dimanfaatkannya seluruh kemampuan dan keterampilan sumberdaya manusia yang mengakibatkan terjadinya *under utilization* sumberdaya manusia tujuannya adalah untuk dapat lebih meningkatkan kondisi kehidupan masyarakatnya.”

”Efektifitas adalah menjamin komitmen terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumberdaya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.” Prajoso, (2007:4.19).

Dari dua pendapat di atas tentang konsep efektifitas dapat disimpulkan bahwa efektifitas program bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan diperkotaan (P2KP) sangat penting untuk dipahami dan dilaksanakan sehingga program bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang diperuntukan pada warga miskin tepat sasaran.

2. Efektifitas Pelaksanaan Program

Berbicara tentang efektifitas pelaksanaan program, maka persoalannya menjadi bertambah kompleks apabila diingat bahwa sumber masalah yang hendak dipecahkan tidak hanya berasal dari kondisi individu sebagai penyandang masalah melainkan juga berasal dari level sistim. Oleh sebab itu, betapapun usaha yang dilakukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan upaya pemecahan masalah sosial efektifitasnya belum optimal. Pada prinsipnya setiap manusia sebagai warga masyarakat mempunyai hak untuk hidup layak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Dengan demikian, apabila ditemukan warga masyarakat yang kehidupannya memperlihatkan kondisi yang tidak memenuhi kriteria kelayakan tersebut, pemerintah perlu memberikan perhatian meskipun sekedar untuk memenuhi kebutuhan minimalnya.

3. Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)

Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) adalah suatu proyek yang bertujuan membantu masyarakat miskin yang tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk mendapat pendanaan bagi usaha kecil maupun pembangunan/perbaikan sarana dan prasarana dasar lingkungan yang turut menunjang kegiatan usaha kecil.

Banyak program pengentasan kemiskinan yang ada dan pernah dilaksanakan di Indonesia, misalnya Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan contoh penerapan pembangunan desa terpadu dalam upaya pengentasan kemiskinan yang menggunakan model organisasi berupa Badan Pelaksanaan Pembangunan Desa Terpadu Tingkat Nasional (P2DT2N) yang kemudian mempunyai jaringan sampai ketingkat bawah.

Sebagai konsekuensinya, secara normatif sangat memperhatikan proses pelaksanaan dari masyarakat atau yang lebih dikenal sebagai mekanisme *bottom up* dibandingkan yang bersifat *top down*. Di samping itu, pelaksanaan ini juga memberikan perhatian bagi tumbuhnya institusi lokal yang diharapkan dapat memfasilitasi mekanisme pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) oleh masyarakat.

”Dengan tumbuhnya institusi lokal diharapkan usaha pengentasan kemiskinan keberlanjutan dapat terwujud. Walaupun demikian, apakah prinsip-prinsip normatif tersebut juga terwujud dalam pelaksanaannya, atau apakah *das sollen* sesuai *das sein?*, memang perlu dikaji melalui studi evaluasi dan *monitoring* dalam pelaksanaannya.” Soetomo, (2006:218).

Sehubungan dengan hal tersebut masalah kemiskinan di Indonesia saat ini dirasakan sudah sangat mendesak untuk ditangani. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 telah mengecilkkan arti berbagai pencapaian pembangunan. Kemiskinan merupakan persoalan struktural dan multi dimensial yaitu mencakup politik, sosial, ekonomi, aset dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari dimensi-dimensi kemiskinan tersebut muncul dalam berbagai bentuk yaitu:

a. Dimensi politik.

Dimensi politik sering muncul dalam bentuk tidak dimilikinya wadah organisasi yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin, sehingga mereka benar-benar tersingkir dari proses pengambilan keputusan. Bagi masyarakat itu merupakan hal yang sangat penting, sebab hal itu menyangkut harga diri mereka. Kunci yang dibutuhkan untuk melangsungkan hidup mereka secara layak salah satunya adalah mudahnya mengakses informasi.

b. Dimensi sosial.

Dimensi sosial sering muncul adalah bentuk tidak terintegrasikannya masyarakat miskin kedalam institusi sosial yang ada dan terinternalisasikannya budaya kemiskinan yang merusak kualitas manusia maupun etos kerja mereka.

c. Dimensi ekonomi.

Dimensi Ekonomi muncul adalah bentuk rendahnya penghasilan, kurangnya bantuan modal usaha sehingga mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya sampai batas yang layak.

d. Dimensi aset.

Dimensi aset muncul adalah rendahnya kepemilikan masyarakat miskin terhadap berbagai hal, termasuk aset yang bisa dijadikan sebagai modal hidup masyarakat, baik aset kualitas sumber daya manusia, peralatan kerja, modal kerja, dan sebagainya.

Karakteristik kemiskinan seperti tersebut di atas dan krisis ekonomi yang terjadi telah menyadarkan semua pihak bahwa pendekatan dengan cara yang dipilih dalam penanggulangan kemiskinan selama ini perlu diperbaiki ke arah pengokohan kelembagaan masyarakat. Keberadaan kelembagaan masyarakat ini dibutuhkan dalam rangka membangun organisasi kaum miskin yang mandiri, berkelanjutan dalam menyalurkan aspirasinya serta mereka mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Upaya pengokohan maka perannya adalah sebagai salah satu penggerak dalam "melembagakan" dan "memberdayakan" kembali tentang nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan sebagai nilai utama yang melandasi aktivitas penanggulangan kemiskinan, sehingga diharapkan tidak ada lagi kelompok masyarakat yang masih

terjebak dalam lingkungan kemiskinan yang pada gilirannya diharapkan dapat tercipta lingkungan kota/desa dengan perumahan yang lebih layak huni dalam pemukiman yang responsif, dengan sistem sosial kemasyarakatan yang lebih memadai dengan melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Model tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai penyelesaian persoalan kemiskinan yang bersifat multi dimensional dan struktural khususnya yang terkait dengan dimensi politik, sosial, dan ekonomi. Disamping itu, dalam jangka panjang pemerintah mampu menyediakan aset yang lebih baik bagi masyarakat miskin dalam meningkatkan pendapatan maupun menyuarkan aspirasinya dalam pengambilan keputusan. Mengingat Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan landasan atau pemicu tumbuhnya sinergi gerakan bersama dalam menanggulangi kemiskinan.

4. Peningkatan Kesejahteraan

Mengukur tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Hilhorst dan Kakter, (1985:28) mengemukakan bahwa;

”tiga pendekatan yang berbeda dalam menyusun indikator kesejahteraan. Pendekatan pertama adalah indikator yang memungkinkan dapat diukur dengan nilai uang, seperti GNP, pendekatan kedua adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kondisi sosial yang sering disebut dengan indikator objektif, dan pendekatan ketiga adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui persepsi masyarakat atau penilaian masyarakat terhadap kesejahteraannya yang sering disebut dengan indikator subjektif.”

Sehubungan dengan ketiga pendekatan di atas maka kesejahteraan dapat digambarkan dengan berbagai hal seperti tingkat kesehatan, makanan dan gizi, perumahan, pakaian, dan tersedianya air bersih. Kenyataan ini dapat menggambarkan realitas kehidupan masyarakat miskin yang ada. Sementara itu,

taraf hidup dan kesejahteraan dapat diukur dari persepsi dan pendapat warga masyarakat itu sendiri dan kondisi kehidupannya.

Tujuan utamanya adalah mengetahui tingkat kepuasan masyarakat tentang kondisi kesejahtraannya secara keseluruhan.

”Pengukuran tingkat kesejahteraan melalui *Physical Quality of Life Indeks* (PQLI) atau indeks mutu hidup. *Physical Quality of Life Indeks* (PQLI) adalah suatu indek pengukuran yang terdiri dari tiga komponen yaitu harapan hidup sejak usia satu tahun, tingkat kematian bayi dan melek huruf, ketiga komponen diukur mengikuti skala 0 sampai 100 dan dijumlahkan kedalam satu indeks tunggal” Sjahrir, (1986:44).

Sementara itu Hardiman dan Migley, (1982:33) membedakan tiga pendekatan dalam mengukur kebutuhan pokok yang identik dengan kemiskinan.

”Ketiga pendekatan tersebut adalah pengukuran garis kemiskinan, indikator taraf hidup dan indikator ketimpangan. Indikator kemiskinan menggunakan asumsi pada tingkat pendapatan atau *income* tertentu seseorang dapat hidup secara minimal sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Sajogyo kemudian membuat ukuran garis kemiskinan tidak dari pendapatan tetapi dari konsumsi perkapita per tahun dalam nilai setara beras.”

Melihat tiga pendapat di atas tentang konsep kesejahteraan maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan adalah perubahan pola hidup baik secara individu maupun kelompok. Tujuan pembangunan pada umumnya dan pembangunan khususnya masyarakat desa adalah meningkatkan kesejahteraan atau peningkatan taraf hidup masyarakat. Pengertian taraf hidup masyarakat maupun kesejahteraan masyarakat mempunyai berbagai dimensi. Beberapa pihak beranggapan bahwa pengertian kesejahteraan mengarah kepada dimensi fisik, ekonomi, mental dan sosial dengan menggunakan ukuran relatif sehingga dapat dikatakan bahwa kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat meningkat apa bila semakin banyak kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Oleh sebab itu, peningkatan kesejahteraan dapat juga diartikan sebagai suatu usaha dengan semakin banyaknya aspek kebutuhan terpenuhi. Kesejahteraan masyarakat mempunyai berbagai dimensi, banyak pendapat yang mengatakan bahwa dimensi ekonomi memegang peranan yang cukup penting karena dapat menjadi sarana dan pendorong bagi pemenuhan kebutuhan pada dimensi yang lain. Apa bila pendapat tersebut diikuti maka dapat dipahami bahwa prasyarat utama agar masyarakat banyak memenuhi kebutuhannya dalam berbagai dimensi adalah peningkatan pendapatan. Oleh sebab itu, persoalan utama dalam proses pembangunan termasuk pembangunan masyarakat adalah bagaimana mengupayakan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat secara cepat, sehingga masyarakat akan berpeluang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan lebih banyak.

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Desa Barangka Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton.

"Pembangunan dalam kebijakan sosial tidak harus ditempatkan sebagai bentuk respon dari keprihatinan berdasarkan pandangan humanitarian untuk mewujudkan kebutuhan warganya, tetapi juga dapat merupakan respons dari kegelisahan sosial yang bersumber dari adanya ketidak-adilan." Hill, (1997:3).

Ketidak-adilan tersebut dapat bersumber dari masalah struktural yang menyangkut distribusi penguasaan sumber daya, akses terhadap pengambilan keputusan, akses terhadap pelayanan, serta adanya dari institusi sosial yang diskriminatif dan dominasi kelompok tertentu atau marginalisasi kelompok yang lain.

Sehubungan dengan hal ini Migley, (2005:34) mengatakan bahwa

”pembangunan sosial lebih terfokus pada komunitas dan struktur sosialnya dari pada individu, termasuk pemberian pelayanan dan usaha rehabilitasi individu sebagai penyandang masalah. Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan suatu wadah untuk menanggulangi kemiskinan akibat krisis moneter yang berkepanjangan, sehingga terjadi kesenjangan yang ditandai dengan adanya pengangguran dan kemiskinan.”
Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Proyek

Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Desa Barangka Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton adalah program yang bersifat pemberdayaan, sehingga dalam pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Desa Barangka Kecamatan Kapontori terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu:

1. Belum sepenuhnya memahami tujuan dan manfaat Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan.
2. Terbatasnya dana yang tersedia sehingga tidak mencakup seluruh warga desa yang menjadi sasaran.
3. Belum sepenuhnya terserap oleh masyarakat selaku sasaran program sehingga menimbulkan sulitnya program berjalan cepat.
4. Kurangnya sosialisasi tentang program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan.
5. Kurangnya pemahaman terhadap konsep pelaksanaan program sehingga mengakibatkan masyarakat menjadi apatis terhadap program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)

6. Penerima Bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).

Dalam pelaksanaan program bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) masyarakat miskin sebagai penerima bantuan baik perorangan maupun kelompok keluarga miskin yang berada di suatu wilayah administrasi pemerintahan di tingkat kabupaten dan kota baik yang berstatus kelurahan, maupun desa perkotaan yang tersebar diseluruh wilayah perkotaan di Indonesia. Pengertian perkotaan dalam program ini tidak harus identik dengan wilayah yang secara administratif berada di dalam suatu kota di bawah pemerintah kota, melainkan

perkotaan dalam pengertian wilayah perkembangan sosial ekonomi. Sangat mungkin sebuah desa di wilayah kabupaten masuk klasifikasi perkotaan karena dilihat kondisi sosial ekonominya bersifat urban. Untuk maksud tersebut maka program ini telah menetapkan suatu kriteria guna menentukan status perkotaan. Status perkotaan sebuah wilayah kelurahan desa perkotaan diperoleh dari data *BPS* yang telah diolah. Data status perkotaan tersebut merupakan olahan dari berbagai data yaitu data desa tertinggal, profil desa, provinsi dalam angka potensi desa, dan data *sensusnas 1995*.

Sementara itu, suatu kecamatan dinyatakan sebagai kecamatan perkotaan apabila terdapat separuh atau lebih kelurahan atau desa perkotaan di dalam kecamatan yang bersangkutan. Daerah tingkat kabupaten dinyatakan sebagai daerah atau kabupaten perkotaan apabila terdapat separuh atau lebih kecamatan perkotaan di wilayah administrasi pemerintahannya. Daerah kota atau yang berada dalam wilayah pemerintah kota secara otomatis dinyatakan sebagai daerah perkotaan.

Berdasarkan desain programnya, visi Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) adalah masyarakat mampu membangun sinergi dengan berbagai pihak untuk menanggulangi kemiskinan secara mandiri, efektif dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan misi Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yaitu memberdayakan masyarakat perkotaan, terutama masyarakat miskin, dalam upaya penanggulangan kemiskinan, melalui pengembangan kapasitas, penyediaan sumber daya, dan membudayakan kemitraan strategi antara masyarakat dan pelaku-pelaku pembangunan lokal lainnya.

Tujuan pembangunan pada umumnya dan pembangunan masyarakat desa pada khususnya adalah peningkatan kesejahteraan atau peningkatan taraf hidup masyarakat. Pengertian taraf hidup masyarakat maupun kesejahteraan masyarakat mempunyai berbagai dimensi yaitu dimensi; fisik, ekonomi, mental dan sosial.

Dengan menggunakan ukuran relatif dapat dikatakan bahwa kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat meningkat apabila semakin banyak kebutuhan yang dapat dipenuhi. Oleh sebab itu peningkatan kesejahteraan dapat diartikan juga sebagai suatu usaha untuk memenuhi banyak aspek kebutuhan. Namun diakui bahwa kesejahteraan masyarakat mempunyai berbagai dimensi. Beberapa pendapat mengatakan bahwa dimensi ekonomi memegang peranan yang cukup penting karena dapat menjadi sarana dan pendorong bagi pemenuhan kebutuhan pada dimensi yang lain. Apabila pandangan tersebut diikuti, maka harus dipahami bahwa pernyataan persyaratan utama agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dalam berbagai dimensi adalah peningkatan pendapatan. Oleh sebab itu, persoalan utama dalam proses pembangunan termasuk pembangunan masyarakat adalah bagaimana mengupayakan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat secara cepat, sehingga masyarakat lebih berpeluang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

7. Penyebab Kemiskinan dan Penanggulangannya

Persoalan kemiskinan adalah salah satu problema yang melekat dalam masyarakat baik yang ada di kota maupun yang ada di pedesaan. Sebelum krisis tahun 1997, Indonesia adalah sebuah surga nan ajaib, dimana para investor asing saling berlomba untuk menanamkan sahamnya di Indonesia. Sebenarnya sejak awal telah banyak yang menyarankan, namun semuanya terlenta dan terbuai oleh kepuasan menyaksikan keberhasilan ekonomi yang berlangsung selama tiga dasa warsa. Dengan jiwa kerdil kita melangkah sangat tergesa-gesa untuk mendahului angan dengan menafikan kritik baik internal maupun datang dari negara sahabat.

Kemiskinan dalam konteks ini adalah suatu kondisi dimana seseorang menjadi tidak berdaya karena terdapatnya ketiadaan sumber-sumber yang dimiliki baik sumber kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya. Oleh karena itu,

diperlukan suatu alternatif penanggulangannya. Kemiskinan merupakan persoalan multi dimensional yang tidak saja melibatkan faktor ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Untuk itu tidaklah mengherankan bila kesulitan. Kemiskinan bila dikaji dari pandangan beberapa ahli menjelaskan berbeda-beda tergantung dari sudut mana mereka melihat.

Menurut Gunawan, dalam Hamdan, (2003:7)

”kemiskinan adalah masalah pembangunan yang sangat multi dimensional yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Kemiskinan ditandai dengan keterisolasian, keterbelakangan, dan pengangguran, kemudian menjadi ketimpangan antar daerah, antar sektor dan antar golongan penduduk” .

”Menurut Heru Nugroho dalam Hamdan, (2003:7) ada dua cara kategori tingkat kemiskinan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana tingkat pendapatan masyarakat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandang papan, kesehatan dan pendidikan, sedangkan kemiskinan relatif adalah perhitungan kemiskinan berdasarkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Disamping itu kemiskinan dapat dibedakan dalam tiga pengertian yaitu kemiskinan natural (alamiah), kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan alamiah adalah keadaan miskin karena dari asalnya memang miskin karena tidak memiliki sumberdaya lainnya, sehingga mereka tidak dapat ikut dalam kegiatan pembangunan”.

”Kemiskinan Struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur masyarakat itu mengakibatkan mereka tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang seharusnya tersedia bagi mereka. Selo Soemardjan dalam Awaludin, (1987:3),

”sedangkan kemiskinan kultural adalah mengacu pada sikap hidup seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budayanya, dimana mereka sudah merasa cukup dan tidak merasa kekurangan lagi. Kelompok masyarakat miskin struktural tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mudah untuk melakukan perubahan, menolak untuk melakukan perkembangan dan tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupannya, akibatnya tingkat pendapatan mereka rendah menurut ukuran yang dipakai oleh masyarakat pada umumnya.” Gunawan dalam Hamdan, (2003: 8)

Beberapa Konsep-konsep kemiskinan tersebut di atas menjadi jelas bahwa kemiskinan itu sendiri berada dalam ukuran yang berbeda setiap orang dan juga

setiap daerah sehingga untuk menentukan kategorinya pun sulit untuk berlaku secara umum.

”Kemiskinan sesungguhnya merupakan konsekuensi dari sesuatu struktur masyarakat dengan penduduk yang sangat padat, terbatasnya sumberdaya, terbatasnya akses-akses terhadap barang-barang konsumsi tingkat kesehatan yang rendah dan kesempatan pendidikan yang tidak merata.” Lewis dalam Lindyastuti, (1996:1).

Penjelasan tentang kemiskinan di atas memang tidak ada pilihan kecuali perlu terus diupayakan untuk dicarikan jalan tentang penanggulangannya.

”Ada beberapa strategi yang perlu dikembangkan untuk mengurangi kemiskinan, diantaranya adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan *pertama* mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan cara menyelenggarakan berbagai proyek inpres karena proyek ini akan mendatangkan sumber-sumber dana pembangunan dari pusat ke daerah. *Kedua*, mempermudah lapisan sosial masyarakat miskin untuk memperoleh akses dalam berbagai pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan lain-lain. *Ketiga*, Penyediaan fasilitas-fasilitas kredit untuk masyarakat lapisan paling bawah seperti kupedes, kredit bimas dan lain-lain. *Keempat*, Pembangunan infra struktur ekonomi pedesaan khususnya pembangunan pertanian. *Kelima*, Pengembangan kelembagaan seperti Pelaksanaan Pengembangan Wilayah (PPW), Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT), Perencanaan Peningkatan Petani Kecil (P4KT) dan lain-lain.” Heru Nugroho dan Awan, (1998:28).

”Selain dari upaya pengentasan kemiskinan di atas terdapat pula kebijaksanaan penanggulangan kemiskinan yaitu mendukung dan menunjang perkembangan penduduk dan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan.” Gunawan, (1998:37).

Oleh karena itu dari realita yang ada maka penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan secara bertahap, terus menerus dan terpadu yang didasarkan pada kemandirian yaitu meningkatkan kemampuan penduduk yang miskin untuk menolong diri mereka sendiri.

Hal ini berarti memberikan kesempatan yang luas bagi penduduk miskin untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi yang produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Pemenuhan kebutuhan dasar akan memberi peluang bagi penduduk miskin untuk

melakukan kegiatan sosial ekonomi yang dapat lebih memadai. Sehubungan dengan itu diprioritaskan pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat miskin, cakupannya berupa peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan permodalan, kegiatan pelatihan yang terpadu sejak dari pengumpulan modal, penguasaan teknik produksi, pemasaran dan pengelolaan surplus, mutu yang baik dan harga barang terjangkau oleh masyarakat miskin. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan penguatan kelembagaan melalui pengembangan kegiatan sosial ekonomi yang didasarkan pada kebersamaan wadah kelompok swadaya masyarakat, penggalangan kemitraan antara pengusaha golongan ekonomi lemah. Pengembangan kelembagaan ini diharapkan tumbuh dari bawah, berakar dan mendapat dukungan dari masyarakat itu sendiri.

Persoalan kemiskinan berkaitan erat dengan konsep atau program pemberdayaan. Ada beberapa pandangan tentang kemiskinan. Salah satunya adalah Nashier berpendapat,

"pertama, kemiskinan adalah berkaitan dengan nasib kehidupan mereka diluar kemampuan mereka. kedua, melihat kemiskinan disebabkan oleh pendidikan rendah, kekurangan gizi dan lainnya, ketiga, kemiskinan karena pengawasan yang lemah sehingga menimbulkan korupsi, manajemen tidak efektif dan hukum tidak jalan, keempat, kemiskinan karena adanya penghisapan uang rakyat oleh penguasa dan cenderung menipu rakyat dan kelima, kemiskinan karena adanya ketidakadilan tatanan sosial, ekonomi, politik dan budaya." Nashier (2001:14).

Dari berbagai persoalan di atas diharapkan adanya penanggulangan Kemiskinan yang lebih baik Sehingga membuat masyarakat menjadi berdaya.

8. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dalam konteks ini bukanlah merupakan sesuatu yang asing dikalangan luas pada umumnya. Istilah pemberdayaan secara umum merupakan proses penyadaran masyarakat menjadi mandiri, tidak tergantung dan mampu menghadapi segala tantangan dalam kehidupannya. Selain itu

pemberdayaan masyarakat dikenal juga sebagai upaya pemampuan masyarakat agar dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dengan kekuatan sendiri secara berkesinambungan. Dalam kaitan dengan persoalan kemiskinan yang telah dijelaskan di atas, maka konsep pemberdayaan merupakan salah satu strategis dalam penanggulangannya.

Oleh karena itu selama ini persoalan kemiskinan hanyalah bersifat ekonomi semata sehingga apabila kebutuhan ekonomi sudah tercapai seolah-olah proyek penanggulangan kemiskinan juga ikut selesai. Ini berarti menanggalkan persoalan-persoalan kemiskinan yang tidak berdimensi ekonomi seperti kemiskinan struktural dan politis.

”Untuk itu diperlukan adanya pemberdayaan yang bertujuan menekan perasaan ketidak berdayaan masyarakat miskin bila berhadapan dengan struktur sosial politik.” Heru Nugroho dalam Awan, (1999:34).

Pandangan yang berhubungan dengan konsep pemberdayaan, paling tidak ada dua macam perspektif pendekatan pemberdayaan yaitu *pertama*, perspektif yang memfokuskan perhatian pada sosial sumberdaya (*recouces allocation*) yakni kelompok masyarakat yang dianggap sebagai analisis dari (atau paling tidak) berkaitan dengan sindrom kemiskinan yang melekat pada kehidupan sekelompok masyarakat. *Kedua*, perspektif yang memfokuskan perhatian pada penampilan kelembagaan (*institusional performance*) yakni ketidak berdayaan dianggap sebagai konsekuensi dalam bentuk pengelolaan pelayanan yang diskriminatif (hanya menguntungkan kelompok tertentu). Kedua perspektif di atas memberikan pemahaman bahwa kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat pada intinya disebabkan oleh ketidak mampuan dan ketidak mandirian masyarakat itu sendiri.

Paulo Freire melihat bahwa ”pemberdayaan adalah proses penyadaran seseorang atau sekelompok orang terhadap realitas struktural yang menghambat

realisasi potensi yang dimilikinya menuju kebebasan dan kolektif dari tekanan atau dominasi struktur kelembagaan dalam Trijono, (2002:4).

Menurut Ginanjar Kartasasmita dalam Kerangka memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Oleh karena itu, keberdayaan konteks ini adalah merupakan kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan sehat mental, terdidik dan kuat tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi.” Ginanjar, (1996:144).

”Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat. Dalam kerangka pembangunan Nasional upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari sudut pandang; *pertama*, penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang, *kedua*, peningkatan kemampuan masyarakat dalam membangun melalui berbagai bantuan dana modal bergulir, pembangaunan prasarana dan sarana baik sosial maupun ekonomi serta pembangunan kelembagaan, *ketiga*, perlindungan melalui pemilihan kepada kepada yang lemah dan mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan.” Gunawan, (1999:254-255).

Sehubungan dengan hal di atas, maka konsep pemberdayaan dimaksud sebagai jawaban atau relitas ketidak berdayaan (*disempowermen*) sehingga menjadi tidak berdaya adalah mereka yang kehilangan kekuatannya yang terdapat dua kemungkinan yaitu dilukiskan sebagai tidak punya (tidak memiliki) dan disebut sebagai kehilangan kekuatan. Menyangkut keterbelakangan masyarakat, fokus masalah adalah *pertama*, tidak tercukupinya kebutuhan dasar seperti makanan, penghasilan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain, *kedua* adalah masalah akses terhadap sumberdaya sebageian masyarakat (elit dan kelas menengah) memiliki akses yang tinggi sementara yang lain masarakayat tidak memiliki akses sehingga cenderung marginal. *Ketiga*, masalah kesadaran masyarakat yaitu masyarakat umum percaya bahwa keadaan mereka berkaitan dengan nasib, dan mampu memahami persoalan yang mereka hadapi secara substansi dan cenderung diselesaikan dengan cara karitatif. *Keempat*, persoalan partisipasi yaitu kenyataan bahwa masyarakat

tidak atau sangat kecil keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri mereka sendiri bahkan mereka dapat dikatakan bahwa nasib mereka ditentukan oleh elit. Hal ini menyebabkan lemahnya kapasitas masyarakat dan cenderung memarjinalkan rakyat. *Kelima*, masalah kapasitas dimana untuk ikut memberikan kontrol dan mengendalikan proses penyelenggaraan pemerintahan, kekuasaan dan berbagai realisasi yang ada. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam upaya memberdayakan masyarakat diperlukan suatu pemenuhan kabutuhan dasarnya yang dalam kesempatan ini dibagi menjadi dua macam yaitu kebutuhan jangka pendek berupa perbaikan kesejahteraan, akses pada pendidikan sebagai wahana mentransformasikan kesadaran, dan kebutuhan jangka panjang yaitu masalah kekuasaan, partisipasi dan kontrol.

9. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Banyak upaya pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan baik pemerintah maupun Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) akan tetapi tidak menyentuh akar permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Perencanaan pemberdayaan yang belum mengarah pada proses perubahan struktur atau ketidak berdayaan secara efektif dari dominasi hambatan struktur yang ada. Strategi yang dipilih umumnya bersifat katatif, sehingga kelompok sosial tidak berdaya.

Sumodiningrat, (1999:254-255)

”berpendapat bahwa perencanaan pemberdayaan masyarakat miskin dapat berjalan dengan baik memperhatikan hal-hal berikut. *Pertama*, strategi dasar pemberdayaan masyarakat yang merupakan acuan upaya pemberdayaan masyarakat. *Kedua*, kerangka makro pemberdayaan masyarakat yang sebgaaian sasaran harus dicapai. Sedangkan strategi kebijaksanaan pemberdayaan menurut Gunawan adalah *pertama*, strategi kebijaksanaan secara langsung mengarah kesasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat antara lain: penciptaan kondisi yang memungkinkan kelangsungan setiap upaya peningkatan pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. *Kedua*, strategi kebijaksanaan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran yang mendukung dasar berupa pangan, sandang, papan, kesehatan pendidikan dan lain-lain. Strategi dalam kebijakan ini diarahkan untuk mendorong dan memperlancar proses transmisi dan kehidupan subsistem mengenai kehidupan pasar.”

Berkaitan dengan itu, maka perlu disadari bahwa dalam pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat tidak mudah dilakukan dalam waktu yang cepat melainkan merupakan proses yang membutuhkan waktu yang cukup lama.

Agar dapat menuju masyarakat mandiri perlu dikembangkan tahap-tahap penggalan dan dorongan motivasi, pembentukan dan penguatan kelembagaan dengan prinsip keswadayaan, konsolidasi dan stabilisasi masyarakat.

”Pengembangan usaha produksi dan pemasaran yang terakhir adalah lepas landas dimana masyarakat sudah mandiri ditandai dengan kemampuan masyarakat membiayai sendiri kebutuhan yang diperlukan.” Hagul, (1986:13).

Dari beberapa penjabaran di atas, jelas bahwa strategi yang dapat memberikan acuan untuk bertindak dalam melakukan pemberdayaan masyarakat miskin adalah penciptaan kondisi kehidupan sosial ekonomi yaitu berupa penyediaan sarana, prasarana penunjang seperti modal usaha dalam pengembangan usaha.

Beberapa pandangan tersebut pendekatan yang utama dalam konsep pemberdayaan adalah masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek

pembangunan tetapi merupakan subyek dari upaya pembangunan itu sendiri. Lebih lanjut dikatakan bahwa upaya memberdayakan masyarakat harus dilakukan dengan menciptakan atau suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Selain dari strategi pemberdayaan yang lebih dikenal dengan *redistribution with grow* yang mengutamakan diantaranya; program harus terarah, dilaksanakan sendiri oleh masyarakat atau kelompok yang menjadi sasaran.

Menurut Korten dalam Hamdan, (2003:19) mengatakan,

”Daya kerja dari suatu program pembangunan adalah fungsi kesesuaian antara mereka yang dibantu dan organisasi yang membantu”. Dengan istilah yang lebih khusus perencanaan pembangunan akan gagal menunjukkan kesejahteraan suatu kelompok jika tidak ada hubungannya yang erat antara penerima bantuan dengan hasil perencanaan. Teori di atas, sesuai dengan kajian perencanaan pembangunan pedesaan di Negara Asia yaitu pada badan pengembangan desa di India, Banglades dan pelayanan keluarga berbasis desa di Muangthai.

Lebih lanjut Korten dan Corner dalam Hamdan, (2003:35)

”Mengemukakan bahwa, ”konsep utama pembangunan yang berpusat pada rakyat merupakan suatu pendekatan pembangunan yang memandang inisiatif dari masyarakat sebagai sumberdaya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan materi dan spritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan”. Kerangka kerja yang lebih disukai pembangunan yang berpusat pada rakyat merupakan suatu pendekatan adalah penusatan perhatian pada manusia dan kemampuan mereka untuk mengungkapkan kebutuhan mereka sendiri.”

10. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Proyek

Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).

Dalam rangka pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan yang perlu diperhatikan adalah langkah-langkah atau tindakan yang akan diambil baik dalam memilih tujuan, sasaran, kegunaan dan kebijakan yang tepat maupun dalam mobilisasi sumber-sumber yang diperlukan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan perencanaan yang selalu diperhatikan adalah langkah-langkah yang diambil,

tindakan individu, kebijakan pemerintah atau kelompok sasaran dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Grindle dalam Hazimuddin Hamdan, (2003:21) mengemukakan,

”ada beberapa langkah implementasi pelaksanaan program yaitu isi kebijakan dan lingkup kebijakan”.

”Isi kebijakan memuat kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan itu sendiri, manfaat, derajat perubahan yang diharapkan, kedudukan pembuatan kebijakan, pelaksanaan program itu sendiri dan program dan sumberdaya, sedangkan lingkup kebijakan adalah berupa kekuasaan, kepentingan strategi yang dilibatkan, kemudian karakteristik lembaga dan penguasa dimana kebijakan itu dilaksanakan serta kepatuhan dan daya tanggap.” Wahab dalam Dewi Nilakrisna, (2002:22).

Van Motter dalam Hazimuddin Hamdan, (2003:21-22) merumuskan,

”faktor yang mempengaruhi implementasi program/kebijakan publik yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber kebijakan, sikap pelaksana dan lingkup ekonomi, sosial dan politik”.

Selain itu juga Muray Edelman dalam Hamdan, (2003:22) mengemukakan ”bahwa sesungguhnya persoalan kebijakan/faktor keberhasilan program tergantung dinamika masyarakat melalui pelibatan aspirasinya perumusan konsep dan kepercayaan terhadap program”.

Namun dibalik itu Howlet dan Ramesta, dalam Hamdan, (2003:22) mencermati dua aspek penting yang mempengaruhi implemmentasi kebijakan yaitu faktor pelaksana program dan keterlibatan peserta dalam sebuah kebijakan. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Sabastier dan Mazmanian, dalam Hamdan, (2003:22) bahwa, dalam merumuskan program yang berhasil terdapat enam elemen yang perlu diperhatikan yaitu:

” *pertama*, tujuan bersifat konsisten dan jelas, *kedua*, menjamin untuk melakukan suatu perubahan, *ketiga*, struktur organisasi yang jelas dan mengupayakan bagi pelaksanaan kebijakan kelompok sasaran, *keempat*, para implementasinya mempunyai komitmen dan keterampilan guna mewujudkan tujuan, *kelima*, adanya dukungan dari kelompok kepentingan dan kekuasaan dan *keenam*, perubahan kondisi sosial ekonomi yang tidak menghilangkan dukungan kelompok.

Beberapa pandangan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa berhasilnya suatu perencanaan sangat dipengaruhi oleh aktor dan sasaran pelaksanaannya, disamping faktor penunjang lainnya yaitu tujuan pelaksanaan yang jelas, sumberdaya manusia, kelembagaan yang transparan dan akuntabilitas serta dukungan birokrasi.

Berkaitan dengan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) maka faktor yang dapat dilihat untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan adalah adanya kelembagaan masyarakat yang efektif, partisipasi masyarakat yang ditandai dengan tergabungnya masyarakat dalam kelompok, kemudahan dalam memperoleh kredit modal, tingkat sosialisasi program yang merata diseluruh masyarakat, kesadaran masyarakat dalam mengembalikan pinjaman dan struktur organisasi yang jelas serta pinjaman dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan seefektif mungkin sesuai peruntukannya.

Beberapa kerangka teoritik yang dijabarkan maka untuk melihat tingkat efektifitas dalam pelaksanaan adalah dengan berkurangnya penduduk miskin, meningkatnya usaha perbaikan tingkat pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin dan lingkungannya, meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produksi anggota kelompok, kuatnya permodalan anggota kelompok, rapinya sistim administrasi, luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain, perluasan pemasaran hasil-hasil usaha dan yang terakhir yaitu meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan perbaikan pendapatan masyarakat miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar lainnya.

B. Kerangka Berpikir

a. Efektifitas Pelaksanaan Program

Berbicara tentang efektifitas pelaksanaan program, maka persoalannya menjadi bertambah kompleks apabila diingat bahwa sumber masalah yang hendak dipecahkan tidak hanya berasal dari kondisi individu sebagai penyandang masalah melainkan juga berasal dari level sistim. Oleh sebab itu, betapapun usaha untuk memperbaiki dan menyempurnakan dalam upaya pemecahan masalah sosial efektifitasnya belum optimal. Pada prinsipnya setiap manusia sebagai warga masyarakat mempunyai hak untuk hidup layak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Dengan demikian, apabila ditemukan warga masyarakat yang dilihat dari kehidupannya memperlihatkan kondisi yang tidak memenuhi kriteria kelayakan tersebut, meskipun sekedar memenuhi kebutuhan minimalnya, negara perlu memberikan perhatian.

b. Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)

Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) adalah suatu proyek yang bertujuan membantu masyarakat miskin yang tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk mendapat pendanaan bagi usaha kecil maupun pembangunan/perbaikan sarana dan prasarana dasar lingkungan yang turut menunjang kegiatan usaha kecil. Banyak program pengentasan kemiskinan yang ada dan pernah dilaksanakan di Indonesia, yaitu Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP).

Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan contoh penerapan pembangunan desa terpadu dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang menggunakan model organisasi berupa Badan Pelaksanaan Pembangunan Desa Terpadu Tingkat Nasional yang kemudian mempunyai jaringan sampai ke tingkat

bawah. Sebagai konsekuensinya, secara normatif sangat memperhatikan proses pelaksanaan dari masyarakat atau yang lebih dikenal sebagai mekanisme *bottom up* dibandingkan yang bersifat *top down*. Disamping itu, dalam pelaksanaannya juga memberikan perhatian bagi tumbuhnya institusi lokal yang diharapkan dapat memfasilitasi mekanisme pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) oleh masyarakat. Dengan tumbuhnya institusi lokal diharapkan keberlanjutan usaha penanggulangan kemiskinan dapat terwujud. Walau demikian, apakah prinsip-prinsip normatif tersebut juga terwujud dalam pelaksanaannya, atau apakah *das sollen* sesuai *das sein*. Memang perlu dikaji melalui studi evaluasi dan *monitoring* dalam pelaksanaannya Soetomo, (2006:218)

c. Peningkatan Kesejahteraan

Secara garis besar, tujuan pembangunan pada umumnya dan pembangunan masyarakat desa pada khususnya adalah peningkatan kesejahteraan atau peningkatan taraf hidup masyarakat. Sementara itu ada pihak yang beranggapan bahwa dalam pengertian kesejahteraan yang penuh terkandung dimensi fisik, ekonomi, mental dan sosial. Dengan menggunakan ukuran relatif dapat dikatakan, bahwa kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat meningkat apabila kebutuhan dapat dipenuhi semakin banyak. Peningkatan kesejahteraan dapat juga diartikan sebagai suatu usaha untuk dapat memenuhi banyak aspek kebutuhan. Walaupun dikauhi bahwa kesejahteraan masyarakat mempunyai berbagai dimensi, banyak pendapat yang mengatakan bahwa dimensi ekonomi memegang peranan yang cukup penting karena dapat menjadi sarana dan pendorong bagi pemenuhan kebutuhan pada dimensi yang lain. Apabila pandangan tersebut diikuti, selanjutnya dapat dipahami pernyataan bahwa persyaratan utama agar masyarakat dapat memenuhi semakin banyak kebutuhannya dalam berbagai dimensi adalah peningkatan pendapatan. Oleh

sebab itu, persoalan utama dalam proses pembangunan termasuk pembangunan masyarakat adalah bagaimana mengupayakan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat secara cepat, sehingga masyarakat lebih berpeluang dalam memenuhi kebutuhannya.

d. Masyarakat

Masyarakat yang dimaksudkan dalam Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) adalah seluruh warga kelurahan/desa peserta Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) baik yang kaya maupun yang miskin, kaum minoritas, pendatang dan penduduk asli setempat yang setelah melalui proses pemberdayaan dapat menyadari dan memahami kondisi kelurahan/desa mereka serta persoalan kemiskinan yang masih dihadapi dan sepakat perlunya pengorganisasian diri untuk menanggulangi persoalan kemiskinan tersebut secara sistematis dan masyarakat mengetahui cara yang terbaik untuk mengatasi masalahnya sendiri tanpa campurtangan pihak yang kuat/penguasa sehingga hak-hak mereka dapat dihargai dan diperhitungkan oleh penguasa tersebut.

C. Definisi Konsep dan Operasional

Definisi Konsep dan Operasional dapat digambarkan dalam hubungan variabel sebagai berikut:

Gambar 2.1
Skema Hubungan Variabel

Efektifitas		Kesejahteraan
<p>Efektifitas adalah menjamin komitmen terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. Projoso, (2007:14-19).</p>		<p>-Garis Kemiskinan -Taraf hidup - Ketimpangan</p> <p>Hardiman dan Migley, (1982:33)</p>

1. Efektifitas

Efektifitas adalah menjamin komitmen terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. Projoso, (2007:14-19).

2. Kesejahteraan

Hardiman dan Migley, (1982:33) membedakan tiga pendekatan dalam mengukur kebutuhan pokok yang identik dengan kemiskinan. Ketiga pendekatan tersebut adalah pengukuran garis kemiskinan, indikator taraf hidup dan indikator ketimpangan.

3. Efektifitas Pelaksanaan Program

Berbicara tentang efektifitas pelaksanaan program, maka persoalannya menjadi bertambah kompleks apabila diingat bahwa sumber masalah yang hendak dipecahkan tidak hanya berasal dari kondisi individu sebagai penyandang masalah melainkan juga berasal dari level sistim. Oleh sebab itu, betapapun usaha untuk memperbaiki dan menyempurnakan terhadap pemecahan masalah sosial efektifitasnya belum berjalan secara optimal.

Pada prinsipnya setiap manusia sebagai warga masyarakat mempunyai hak untuk hidup layak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Dengan demikian, apabila ditemukan warga masyarakat yang dilihat dari kehidupannya memperlihatkan kondisi yang tidak memenuhi kriteria kelayakan tersebut, meskipun sekedar memenuhi kebutuhan minimalnya, negara perlu memberikan perhatian/bantuan.

4. Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)

Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) adalah suatu proyek yang bertujuan membantu masyarakat miskin yang miskin yang tergabung dalam kelompok swadaya masyarakat (KSM) untuk mendapat pendanaan bagi usaha kecil maupun pembangunan/perbaikan sarana dan prasarana dasar lingkungan yang turut menunjang kegiatan usaha kecil. Banyak program pengentasan kemiskinan yang ada dan pernah dilaksanakan di Indonesia, yaitu Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan contoh penerapan pemabangunan desa terpadu dalam upaya pengentasan kemiskinan yang menggunakan model organisasi berupa Badan Pelaksanaan Pembangunan Desa Terpadu Tingkat Nasional yang kemudian mempunyai jaringan sampai ke tingkat bawah.

Sebagai konsekuensinya secara normatif sangat memperhatikan proses pelaksanaan dari masyarakat atau yang lebih dikenal sebagai mekanisme *bottom up* dibandingkan yang bersifat *top down*. Disamping itu, Pelaksanaan ini juga memberikan perhatian bagi tumbuhnya institusi lokal yang diharapkan dapat memfasilitasi mekanisme pelaksanaan Proyek Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) oleh masyarakat. dengan tumbuhnya institusi lokal diharapkan keberlanjutan usaha pengentasan kemiskinan dapat terwujud. Walaupun demikian, apakah prinsip-prinsip normatif tersebut juga terwujud dalam pelaksanaannya atau apakah *das sollen* sesuai *das sein*, memang perlu dikaji melalui studi evaluasi dan *monitoring* dalam pelaksanaannya. Soetomo, (2006:218).

5. Peningkatan Kesejahteraan

Peningkatan kesejahteraan merupakan tujuan pembangunan pada umumnya dan pembangunan masyarakat desa pada khususnya. Taraf hidup masyarakat maupun kesejahteraan masyarakat mempunyai berbagai dimensi, dipihak lain orang beranggapan bahwa dalam peningkatan kesejahteraan yang penuh terkandung dimensi fisik, ekonomi, mental dan sosial. Dengan menggunakan ukuran relatif dapat dikatakan, bahwa kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat akan meningkat apabila semakin banyak kebutuhan dapat dipenuhi. Oleh sebab itu, peningkatan kesejahteraan dapat juga diartikan sebagai suatu usaha untuk dapat memenuhi semakin banyak aspek kebutuhan tersebut. Walaupun diakui bahwa kesejahteraan masyarakat mempunyai berbagai dimensi, banyak pendapat yang mengatakan bahwa dimensi ekonomi memegang peranan yang cukup penting karena dapat menjadi sarana dan pendorong bagi pemenuhan kebutuhan pada dimensi yang lain.

Apabila pandangan tersebut diikuti, selanjutnya dapat dipahami pernyataan bahwa persyaratan utama agar masyarakat dapat memenuhi semakin banyak kebutuhannya

dalam berbagai dimensi adalah peningkatan pendapatan. Oleh sebab itu, persoalan utama dalam proses pembangunan termasuk pembangunan masyarakat adalah bagaimana mengupayakan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat secara cepat sehingga masyarakat akan lebih berpeluang untuk memenuhi semakin banyak kebutuhan-kebutuhannya. Untuk memudahkan proses pengukuran variabel dalam penelitian ini yang dipergunakan maka konsep yang telah dirumuskan dioperasionalkan dalam bentuk indikator-indikator penelitian yang berskala ordinal.

D. Konsep Kunci.

Konsep kunci (definisi konsep) yang digunakan dalam penelitian Efektifitas Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kerangka teori di atas adalah:

- a. **Efektifitas Pelaksanaan** adalah pencapaian keberhasilan yang diperoleh warga masyarakat yang dapat merubah polah hidup dan tingkat pendapatan melalui bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).
- b. **Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)**

Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) adalah sebagai suatu strategi yang ingin secara langsung cepat menangani dan memecahkan masalah kemiskinan, Tjokrowinoto, (1996:217) merumuskan pengertian yang lebih operasional untuk lebih memahami strategi pembangunan yang berorientasi pada paradigma kesejahteraan yang menjanjikan kesejahteraan, sehingga implementasi pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui sebagaimana diketahui bahwa kelompok masyarakat miskin tersebut pada umumnya sudah tejobak

kedalam perangkap kemiskinan atau sindrome kemiskinan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling bertali-temali, baik faktor kultural maupun faktor struktural. Soetomo, (2006:326).

c. Pembangunan Masyarakat

Pembangunan masyarakat, menurut Dirjen Bangdes pada hakekatnya merupakan proses dinamis yang berkelanjutan dari masyarakat untuk mewujudkan keinginan dalam harapan hidup yang lebih sejahtera dengan strategi menghindari kenungkinan tersudutnya masyarakat desa sebagai penanggung akses dari pembangunan regional/daerah atau Nasional, Suparjan dkk, (2003: 21).

d. Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)

Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) adalah program yang bersifat pemberdayaan rakyat dan bersifat desentralisasi tetapi dalam struktur operasionalnya, peranan Tim Koordinasi pusat dalam mengambil keputusan masih cukup kuat.

e. Peningkatan Kesejahteraan

Peningkatan kesejahteraan adalah perubahan pola hidup serta tingkat pendapatan masyarakat. Hal ini sangat berkaitan dengan pembangunan sosial dimana pembangunan sosial merupakan suatu proses perubahan sosial yang terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai suatu keutuhan, karena pembangunan ini dilakukan untuk saling melengkapi. Dalam upaya untuk memenuhi kondisi kehidupan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan hak asasi manusia, maka pemenuhan kebutuhan dapat dirumuskan secara panjang. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa kondisi kehidupan akan semakin sejahtera apabila

semakin banyak kebutuhan dapat terpenuhi. penerima bantuan Proyek

Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) ke arah yang lebih baik.

f. Efektifitas pelaksanaan

Adapun indikator efektifitas pelaksanaan tersebut adalah:

1) Keberhasilan

Keberhasilan yang dimaksud adalah keberhasilan yang diperoleh dalam pelaksanaan bantuan yang diterima melalui Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).

2) Tepat

Tepat yang dimaksudkan dalam bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) adalah tepat sasaran, tepat pelaksanaannya sehingga bantuan yang diterima bagi warga miskin sesuai dengan kebutuhannya.

3) Manjur

Manjur yang dimaksud dalam Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) bahwa bantuan yang diterima bermanfaat dan dapat merubah polah hidup masyarakat, peningkatan pendapatan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis metode dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang memberikan gambaran secara kualitatif tentang efektifitas pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Desain Penelitian.

Penelitian ini mendasarkan pada studi kasus dengan tiga jenis pengkajian yaitu *eksploratif* (mengadakan penjajagan fenomena yang diteliti), *descriptive* (menggambarkan secara deskriptif fenomena yang diteliti) dan *explanatif* (menjelaskan fenomena yang diteliti) yang berusaha menggambarkan lebih mendalam tentang obyek penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil kajian *descriptif*.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi adalah Desa Barangka Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton yang merupakan salah satu desa yang menjadi sasaran pelaksanaan program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kabupaten Buton.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, Interview, dan dokumentasi.

E. Cara Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh informasi/data dalam penelitian ini yaitu menggunakan sample purposif dengan cara memilih warga miskin yang menerima bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel 3.1
Skenario Pengumpulan Data.

Instrumen	Informan/Sumber data	Waktu	Keterangan
● Kuesioner	Responden adalah penerima bantuan langsung maupun penerima manfaat bantuan P2KP Desa Barangka Kec. Kapontori Kab. Buton	25 Nopember s.d. 8 desember 2008	Kuesioner diisi diantar dari rumah kerumah dan di dampingi pengurus P2KP
● Wawancara	Informan adalah Perangkat desa dan Pengurus P2KP	25 Nopember Desember s.d 8 Desember 2008	Pewawancara adalah peneliti sendiri dan tidak menggunakan Tape recorder.
● Studi dokumentasi	Sumber data adalah buku dan sumber lainnya yang relevan dengan judul penelitian	27 Nopember s.d 8 Desember 2008	Dokumentasi tentang kegiatan pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa data responden adalah penerima bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan, perangkat desa

dan pengurus Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sesuai program kerja Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Desa Barangka Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton, sedangkan informan warga miskin sebagai penerima bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).

a. Kuesioner

Kuesioner adalah merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

Kuesioner yang diberikan kepada responden merupakan penerima Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebanyak 30 KK yaitu dengan cara memilih secara acak warga miskin penerima bantuan Pruyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).

b. Interview (Wawancara)

Interview (wawancara) adalah merupakan pertemuan dua orang untuk untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Jumlah informan sebanyak 7 orang yang terdiri dari 2 orang perangkat desa dan 5 orang pengurus Pruyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).

c. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mempelajari berbagai laporan (dokumen) atau bahan-bahan tertulis berupa instruksi, peraturan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Untuk melengkapi data dan keperluan analisis penelitian dikumpulkan jurnal-jurnal, tesis, desertasi yang relevan dengan topik yang akan ditulis. Data tersebut tidak akan digunakan secara terpisah-pisah

melainkan secara simultan dipergunakan untuk keperluan penelitian secara umum untuk mendapatkan hasil kajian yang mendalam.

Data dan informasi lapangan berupa hasil wawancara dan data sekunder yang relevan dengan penelitian ini turut menjadi bahan acuan dalam melakukan penelitian. Data primer yang terkumpul dilapangan mungkin dapat berupa catatan-catatan hasil wawancara dan foto-foto sedang data sekunder yang dikumpul berupa data deskriptif dan statistik yang relevan dengan topik penelitian.

Untuk lebih jelas dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel 3.2
Data perangkat desa, pengurus Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai informan dan responden penerima bantuan menurut kegiatan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)

No	Status Informan	Pengumpulan data	Jumlah
1	Pengurus Desa	Wawancara	2 Orang
2	Pengurus P2KP	Wawancara	5 Orang
3	Penerima bantuan dana bergulir Usaha Dagang/Kios	Kuesioner	3 KK
4	Penerima bantuan dana bergulir Usaha Budidaya Agar-agar	Kuesioner	5 KK
5	Penerima manfaat CMK	Kuesioner	5 KK
6	Penerima bantuan rehabilitas rumah tidak layak huni	Kuesioner	3 KK
7	Penerima manfaat bantuan sarana Jalan lingkungan	Kuesioner	4 KK
8	Penerima manfaat sarana lampu penerang lingkungan	Kuesioner	5 KK
9	Penerima manfaat Bak Air	Kuesioner	5 KK
	Jumlah		37

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa informan adalah semua pemerintah Desa Barangka, pengurus Proyek Penanggulangan Kemiskinan di perkotaan (P2KP) dan respondenya adalah masyarakat penerima bantuan langsung maupun tidak langsung oleh Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang berjumlah 37 orang dan KK yang terdiri dari: melalui wawancara 7 orang yang terdiri dari 2 orang pengurus desa, 5 orang pengurus P2KP dan melalui kuesioner berjumlah 30KK yang merupakan warga miskin penerima bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yaitu 3KK penerima bantuan dana usaha dagang/kios, 5KK penerima bantuan usaha budidaya agar-agar, 5KK penerima manfaat bantuan MCK, 3KK penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni, 4KK penerima manfaat bantuan jalan lingkungan, 5KK penerima manfaat bantuan sarana lampu penerang lingkungan, dan 5KK penerima manfaat bak air. Informan berasal dari tiga dusun: Dusun Batu banawa, Dusun Ngkaniu-ngkaniu dan Dusun Kamelanta yang berada di wilayah Desa Barangka Kec. Kapontori Kab. Buton yang merupakan penerima batuan langsung atau penerima manfaat bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), tiap jenis bantuan di wakili oleh 3 sampai 5 KK yaitu:

1. Penerima bantuan bergulir usaha dagang/kios 3KK
2. Penerima bantuan bergulir usaha budidaya agar-agar 5KK
3. Penerima manfaat bantuan MCK 5KK
4. Penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni 3KK
5. Penerima Manfaat manfaat sarana jalan lingkungan 4KK
6. Penerima manfaat sarana lampu penerang lingkungan 5KK
7. Penerima manfaat bak air 5 KK

Bantuan yang sangat menyentuh kehidupan warga miskin adalah bantuan langsung yaitu bantuan dana bergulir usaha dagang/kios, usaha dagang jual beli ikan, bantuan usaha pembuatan, Bantuan dana bergulir usaha budidaya agar-agar, dan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di mana urutan kegiatan yang dilakukan oleh Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Desa Barangka pada poin 1, 2 dan 4 sedangkan pada poin 3, 5, 6 dan 7 adalah merupakan manfaat yang diterima oleh warga miskin, namun pada kenyataan manfaatnya dapat dirasakan oleh semua warga baik yang mampu maupun tidak mampu bahkan masyarakat umum yang berada di luar Desa Barangka pun juga ikut merasakan manfaatnya.

Data Penerima Bantuan menurut Kegiatan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel 3.3
Data Penerima Bantuan menurut Kegiatan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)

No	Program Kerja yang dilaksanakan	Jumlah	Jumlah
1	Bantuan dana bergulir	1 paket	30 KK
2	Bantuan MCK	6 nit	89 KK
3	Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni	46 unit	46 KK
4	Bantuan sarana jalan lingkungan	400 m	194 KK
5	Bantuan lampu penerang lingkungan	60 unit	60 KK
6	Bantuan bak air	6 unit	60 KK
	Jumlah		479 KK

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah warga yang mendapat bantuan langsung maupun tidak langsung berjumlah 479KK yaitu mendapat bantuan langsung berjumlah 76KK, yaitu terdiri dari bantuan dana bergulir 30KK dan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni 46KK, bantuan tidak langsung berjumlah 403KK yaitu terdiri dari bantuan MCK 89KK, sarana jalan lingkungan 194KK, Lampu penerang lingkungan 60KK, dan bantuan bak air 60KK. Dari jumlah penerima bantuan tersebut maka jumlah menjadi informan dalam penelitian ini adalah 30 KK yaitu warga miskin Desa Barangka sebagai penerima bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di perkotaan (P2KP).

Responden menurut jumlah KK penerima bantuan program kegiatan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel 3.4
Responden menurut jumlah KK penerima bantuan program kegiatan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)

No	Bantuan yang diterima	Jumlah
1	Penerima bantuan dana bergulir usaha dagang/kios	3 KK
2	Penerima bantuan dana bergulir usaha budidaya agar-agar	5 KK
3	Penerima manfaat MCK	5 KK
4	Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni	3 KK
5	Penerima manfaat bantuan sarana jalan lingkungan	4 KK
6	Penerima manfaat sarana lampu penerang lingkungan	5 KK
7	Penerima manfaat bak air	5 KK
	Jumlah	30 KK

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa informan menurut jumlah penerima bantuan kegiatan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dalam penelitian ini adalah 30KK yang merupakan penerima warga miskin sebagai penerima bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yaitu penerima bantuan langsung dan penerima bantuan tidak langsung. Penerima bantuan langsung berjumlah 11KK yang terdiri dari bantuan dana bergulir usaha dagang 3 KK (1 orang usaha dagang/kios, 1 orang usaha dagang ikan, dan 1 orang usaha pembuatan roti), bantuan dana bergulir usaha budidaya agar-agar 5KK dan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni 3KK. Bantuan tidak langsung berjumlah 19KK, yang terdiri dari bantuan MCK 5KK, bantuan sarana jalan 4KK, bantuan lampu penerang lingkungan 5KK dan bantuan bak air 5KK.

F. Prosedur Analisis Data.

Prosedur analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

1. Pengumpulan data dengan dokumen
2. Kesimpulan sementara
3. Triangulasi
4. Penyimpulan akhir.

Sehubungan dengan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini maka pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara terhadap perangkat desa sebanyak 2 orang dan pengurus bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebanyak 5 orang dan pengumpulan data yang dilakukan dengan kuesioner sebanyak 30KK yaitu warga miskin yang mendapat bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dengan cara membagi-bagikan kuesioner yang di isi oleh responden berdasarkan jenis bantuan yang diterima.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM DESA BARANGKA KECAMATAN

KAPONTORI KABUPATEN BUTON

1. Kondisi Geografi

Desa Barangka merupakan salah satu desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu wilayah yang mendapat bantuan Program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Desa Barangka yang merupakan daerah pesisir yang berbukit-bukit, terletak di pulau Buton.

Desa Barangka berbatasan langsung dengan:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Maabulugo

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Kamelanta

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Laut

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Hutan

Desa Barangka dengan luas wilayah: \pm 684.4 Ha. Jumlah jiwa 1.929 jiwa berjarak 17km dari pemerintahan kecamatan dan 78 km dari ibukota Kabupaten Buton di Pasarwajo serta 30 km dengan kota Baubau. Disamping itu Desa Barangka mempunyai 3 Dusun yaitu: (1). Dusun Kamelanta (2). Dusun Ngkaniu-niu (3). Dusun Batu Banawa.

Gambar 4.2 Peta Desa Barangka (telampir pada lampiran pada hal. 129).

2. Struktur Organisasi Desa Barangka

Organisasi merupakan struktur atau wadah dimana usaha kerja- sama itu diselenggarakan. Mooney dalam The Liang Gie, (1979: 14) menyebutkan sebagai

bentuk dari pada perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. Sejalan dengan ini maka proses mengorganisasikan (*organizing*) ialah menyusun struktur dengan membagi-bagi dan menghubungkan orang, wewenang, tugas dan tanggung jawab menjadi kesatuan yang selaras. Sehubungan dengan hal tersebut di atas Desa Barangka membuat struktur organisasi, sehingga jelas tanggung jawab masing-masing dan kewenangnya hal ini dapat dilihat pada gambar 2 dimana nampak jelas terlihat seluruh pengurus atau pegawai yang terlibat dalam pemerintahan desa dengan masing tugas serta batas-batas wewenang masing-masing dari pegawai tingkat atas maupun tingkat bawah yaitu:

1. Kepala Desa Barangka.
2. Sekertaris.
3. Kepala Dusun Ngkaniu-niu.
4. Kepala Dusun Kamelanta
5. Kepala Dusun Batu Banawa.
6. Kaur Pemerintahan
7. Kaur umum.
8. Kaur Pembangunan.

Lebih jelas Struktur Organisasi dapat dilihat pada gambar 4.3 (terlampir pada lampiran halaman 130).

3. Keadaan Penduduk

a. Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Berdasarkan data monografi Desa Barangka pada tahun 2007, jumlah penduduk sebesar 1.929 jiwa dengan 523 KK yang terdiri 920 laki-laki dan 1.009 perempuan.

Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

No	Umur	Jumlah	Jenis kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	0 - 1	45	17	28
2	2 - 10	352	172	182
3	11 - 20	348	135	213
4	21 - 30	127	83	44
5	31 - 40	235	105	130
6	41 - 50	300	115	185
7	51 - 60	164	66	98
8	61 - 70	167	54	113
9	71 - 80	217	89	128
11	91 - 100	3	1	2
12	101 - 110	2	-	2

Sumber, Data Monografi Desa Barangka tahun 2007.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk Desa Barangka jenis kelamin perempuan lebih banyak dibanding dengan jenis kelamin laki-laki di mana perempuan berjumlah 1.009 jiwa dan laki-laki berjumlah 920 jiwa. Usia produktif atau usia kerja yaitu 21-60 tahun laki-laki berjumlah 369 dan perempuan berjumlah 457. Jumlah penduduk yang masuk kategori usia produktif atau usia kerja tersebut berjumlah 826 dan 450 jiwa berada di perantauan dan menjadi karyawan swasta, buruh dan pedagang yang tersebar diseluruh pelosok nusantara bahkan di negeri Jiran Malaysia dan Singapura.

b. Jumlah Penduduk menurut mata pencaharian

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel 4.6
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	- 35 Orang
2	Buruh	- 50 Orang
3	Karyawan Swasta	- 12 Orang
4	Wiraswasta / pedagang	- 28 Orang
5	Ojek	- 17 Orang
6	Nelayan	- 25 Orang
7	PNS	- 14 Orang
8	TNI / POLRI	- 6 Orang
9	Pensiunan	- 2 Orang

Sumber: Data monografi Desa Barangka tahun 2007.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa mata pencaharian penduduk Desa Barangka terdiri atas petani sebanyak 35 orang dan buruh sebanyak 50 orang, karyawan swasta 12 orang, wiraswasta 28 orang, ojek 17 orang, nelayan 25, PNS 14, TNI/POLRI 6 orang, pensiunan 2 orang. Berdasarkan tabel di atas diketahui penduduk dengan mata pencaharian terbanyak jumlahnya adalah: petani 35 dan buruh 50, kondisi geografi desa Barangka yang hanya cocok dengan mata pencaharian tersebut. Data di atas menunjukkan penduduk di usia kerja/sedang bekerja atau mendapat penghasilan sebanyak 189 orang. Hal ini hanya khusus yang bekerja di lingkungan Desa Barangka atau Kabupaten Buton dan Kota Bau-Bau, sehingga jumlah usia kerja atau usia produktif tersebut sebanyak 826 jiwa yang

terdiri atas perantau sebanyak 618 jiwa dan yang bekerja di lingkungan Desa Barangka dan sekitarnya yaitu Kabupaten Buton dan Kota Bau-Bau sebanyak 189 jiwa dan sisanya 19 orang sebagai mahasiswa yang tersebar di beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta, sedangkan sebagian kecil penduduk memilih untuk berwiraswasta atau berprofesi sebagai pedagang.

Ini disebabkan oleh Kecamatan Kapontori hanya berlangsung 7 kali pasar tradisional yang dilakukan secara bergilir dari satu desa ke desa lain dengan pembagian masing-masing mendapat porsi dua kali dalam seminggu atau berpindah-pindah tempat. Misalnya Pasar Desa Barangka mendapat giliran Rabu dan hari Minggu, selanjutnya pasar akan berpindah ke desa Bonetiro yang berjarak 7 km dari Desa Barangka juga terdapat 2 kali pasar yaitu hari Selasa dan hari Jum'at dan di Ibu kota Kecamatan Kapontori yang berjarak 17 km dari Desa Barangka terdapat 3 kali pasar yaitu hari Senin, Kamis dan Sabtu sehingga para pedagang harus berkeliling setiap hari dari satu pasar ke pasar dengan hari-hari yang telah ditentukan di atas. Selain itu, penduduk Desa Barangka ada yang melakoni profesi lainnya bahkan banyak penduduk Desa Barangka yang hidup di daerah perantauan yang berarti bahwa mereka mencari nafkah di daerah lain untuk menghidupi keluarga.

Disamping itu, urutan kedua adalah karyawan swasta sebagian penduduk Desa Barangka bekerja sebagai buruh di sebuah perusahaan pengolahan kayu di Desa Kamelanta yang merupakan desa tetangga Desa Barangka, selain itu penduduk Desa Barangka yang hidup di perantauan sebagian besar bekerja sebagai karyawan swasta (bekerja di perusahaan). Berdasarkan hal tersebut di atas Desa Barangka ditetapkan sebagai penerima bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).

“Karena kondisi geografi yang terdiri dari pesisir laut dan perbukitan maka pemerintah Kabupaten Buton menetapkan Desa Barangka sebagai salah satu desa penerima bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)”

Senada dengan hal tersebut di atas pengurus Desa Barangka lainnya menuturkan;

“Bahwa penentuan dan terpilihnya Desa Barangkan sebagai penerima bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Melalui usulan yaitu dengan kondisi geografi dan keadaan penduduk yang masih banyak yang miskin sehingga mendorong kami untuk buat proposal untuk mendapatkan bantuan tersebut”

Sehubungan dengan penuturan pengurus Desa Barangka maka layak Desa Barangkan untuk diberi bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), dalam meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakatnya.

c. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan di Desa Barangka masih sangat minim hal ini dikarenakan tingkat pemahaman warganya tentang arti pentingnya pendidikan masih sangat kurang terlebih lagi sebagian besar penduduknya masih hidup dibawah garis kemiskinan.

Untuk Lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel 4.7
Tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	228 Orang
2	SMP	267 Orang
3	SMA	127 Orang
4	D1	- Orang
5	D2	6 Orang
6	D3	2 Orang
7	S1	10 Orang
8	S2	1 Orang

Sumber : Data monografi Desa Barangka tahun 2007

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan dapat dibagi 4 tingkatan pendidikan yang mendapat jumlah terbanyak lulusannya yaitu: SD berjumlah 228 orang, SMP berjumlah 267 orang, SMA berjumlah 127 orang, dan D1-S2 berjumlah 19 orang. Jumlah terbesar penduduk Desa Barangka mempunyai tingkat pendidikan SD berjumlah 228 orang untuk itu tingkat ekonomi sebagai faktor utama yang sangat mempengaruhi besar kecilnya lulusan di tiap tingkatan pendidikan dan juga tingkat kesadaran masyarakat tentang arti dan hakekat pendidikan yang sebenarnya masih sangat kurang. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak penduduk Desa Barangka yang belum menamatkan pendidikan kejenjang Sekolah Dasar atau putus sekolah karena berbagai faktor.

Pemerintah mencanangkan program wajib belajar sembilan tahun bagi semua anak Indonesia, namun kenyataan khususnya di Desa Barangka seperti itu

adanya. Berdasarkan analisa peneliti melalui pengamatan dilapangan maka keadaan seperti ini sangat erat kaitannya dengan kondisi keluarga dan penghasilan orang tua yang tidak memadai sehingga sebagian besar penduduk usia sekolah tidak dapat bersekolah atau melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi sehingga sebagian besar penduduk bermata pencaharian buruh petani.

4. Keadaan Sarana dan Prasarana

a. Sarana Ibadah

Desa Barangka secara keseluruhan penduduknya beragama islam hal ini nampak pada kondisi sarana dan prasarana yang ada di Desa Barangka yaitu mesjid 1 buah, mushollah 1 buah dan TPA 1 buah.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel 4.8
Kondisi Sarana Ibadah dan Pendidikan Desa Barangka

No	Sarana	Jumlah
1	Mesjid	1
2	Madrasah	-
3	Pesantren	-
4	Mushola	1
5	Gereja	-
6	Wihara	-
7	Pura	-
8	TPA	1

Sumber : Data monografi Desa Barangka Tahun 2007.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa data monografi Desa Barangka nampak jelas bahwa sebagian besar penduduknya beragama Islam yang ditunjukkan dengan sarana ibadah yang ada yaitu Masjid 1 buah dan 1 Musholah, dan Taman Pengajian Al'Quran (TPA).

b. Keadaan Sarana Kesehatan dan Air Bersih

Berdasarkan data monografi desa Barangka kondisi sarana kesehatan sangat penting bagi kehidupan masyarakat yang didukung dengan sarana air bersih yang lebih memadai.

Untuk jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel 4.9
Sarana Kesehatan dan Air Bersih

No	Sarana	Kesihatan	Air Bersih
1	Puskemas	1 Buah	
2	Apotek	- Buah	
3	Toko Obat	- Buah	
4	PDAM		23 Buah
5	Sumur Gali		2 Buah
6	Sumur Pompa		- Buah

Sumber : Data monografi Desa Barangka tahun 2007

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa di desa Barangka terdapat 1 unit Puskemas yang merupakan pusat pelayanan kesehatan bagi masyarakat Desa Barangka dan sekitarnya. Sarana air bersih dari PDAM sebanyak 23 buah dan sumur gali 2 buah hal ini menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat masih sangat kurang atau dengan asumsi bahwa yang mampu memiliki sarana air bersih melalui PDAM masih sangat kurang sehingga Proyek Penanggulangan Kemiskinan di

Perkotaan (P2KP) mengadakan sarana air bersih terutama pengadaan bak air untuk untuk penampungan air bersih dan pengadaan MCK yang dapat dimanfaatkan oleh warga miskin juga masyarakat umum lainnya.

c. Keadaan Sarana Sosial/Lingkungan

Desa Barangka terdiri dari pesisir dan pegunungan sesuai dengan letak geografisnya dimana penduduknya hidup di daerah daratan dan sebagian lagi hidup di daerah pesisir, masalah sosial tidak terpikirkan untuk itu. Melalui Program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sarana sosial dan lingkungan menjadi program Program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) seperti jalan, MCK, lampu penerangan, bak air dan sarana lainnya.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel 4.10
Sarana Sosial/Lingkungan

No	Sarana	Jumlah
1	Jalan	1.750.m
2	MCK	20 Buah
3	Jembatan	1 Buah
4	Tempat pembuangan sampah	- Buah
5	Pengadaan lampu penerang lingkungan	60 unit
6	Pengadaan bak air	6 unit

Sumber : Data monografi Desa Barangka Tahun 2007

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan jumlah bahwa sarana sosial seperti Jalan lingkungan masih sangat dibutuhkan seperti tampak pada tabel bahwa panjang yang jalan telah dibuat oleh Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di desa Barangka sepanjang 1. 750m, MCK sebanyak 20 buah, jembatan 1

buah, lampu penerang lingkungan 60 unit dan pengadaan bak penampungan air bersih 6 unit. MCK yang dibangun melalui bantuan Program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dapat dimanfaatkan oleh 5 sampai dengan 6 kepala keluarga. Hal ini belum mencapai rasional jumlah penduduk miskin yang berjumlah 294 kepala keluarga, berarti bahwa jika 1 MCK dapat melayani 5 sampai dengan 6 kepala keluarga, dengan jumlah keluarga miskin 294 kepala keluarga maka jumlah MCK yang harus dibuat sebanyak 48 buah sampai dengan 49 buah.

Seperti dituturkan oleh Pengurus Desa Barangka berikut ini:

“Bantuan yang diberikan oleh Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sudah sesuai dengan sakala prioritas bagi kebutuhan warga yang sangat mendesak dan warga miskin sudah sangat terbantu dengan bantuan ini namun untuk memenuhi sesuai keinginan masyarakat belum terpenuhi.”

MCK yang telah dibuat oleh Proyek Penanggulangan Kemiskinan di perkotaan (P2KP) sebanyak 20 buah berarti baru mencapai separuh dari yang diharapkan oleh warga miskin, data tersebut menunjukkan ± 35 buah MCK yang harus diadakan melalui bantuan Program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) untuk itu masih jauh dari rasio ideal kelayakan sarana khususnya MCK bagi warga miskin Desa Bangka bila dikaji melalui rasio jumlah penduduk miskin Desa Barangka yang sebenarnya.

d. Keadaan Sarana Transportasi

Keberhasilan pembangunan yang telah dicapai tidak luput dari lancarnya sarana transportasi ke desa-desa, ini menimbulkan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pendidikan, kesejahteraan masyarakat, dan juga memudahkan masyarakat untuk menjalankan kegiatan sehari-harinya terutama keperkotaan,

bahkan membuka agen-agen pembeli (penampung) hasil pertanian yang datang ke desa.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel 4.11
Jenis/Macam Sarana Transportasi

No	Jenis Transportasi	Jumlah
1	Mobil	10 buah
2	Bus	- buah
3	Taxi	- buah
4	Sepeda Motor	23 buah
5	Becak	- buah
6	Sepeda	5 buah
7	Gerobak	6 buah

Sumber: Data monografi desa Barangka tahun 2007

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa ternyata jenis transportasi sepeda Motor yang cukup banyak digunakan sebagai alat transportasi. Desa Barangka terletak pada Jalan Poros Baubau Kapontori yang menghubungkan langsung Kota Baubau maka sarana jalan merupakan sarana pendukung yang utama, namun masyarakat Desa Barangka sebagian besar menggunakan sarana transportasi umum seperti mobil untuk keperluan bepergian tergantung dari kemampuan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

B. TAHAPAN KELUARGA SEJAHTERA

Keluarga sejahtera dan prasejahtera adalah merupakan masalah yang sudah secara nasional selalu dijadikan program kerja di bidang kependudukan melalui bidang yaitu BKKBN. Untuk melihat penggolongan masing-masing keluarga, badan

pengendalian keluarga sejahtera telah menetapkan beberapa indikator tahap keluarga sejahtera yaitu:

- a. Keluarga sejahtera 1 adalah keluarga yang telah melaksanakan ibadah, makan dua kali atau lebih dalam sehari, memiliki pakaian berbeda untuk aktifitas, bagian terluas lantai rumah bukan tanah, dan anak sakit di bawah kesarana kesehatan.
- b. Keluarga sejahtera 2 adalah mempunyai syarat keluarga sejahtera 1 sudah terpenuhi ditambah ibadah yang teratur, makan daging/ikan/telur/satu kali seminggu satu stel pakaian pertahun, luas lantai $>8m^2$ /jiwa, sehat 3 bulan terakhir punya penghasilan tetap, usia 10 sampai 60 tahun bisa baca tulis huruf latin, usia 6 sampai 15 tahun bersekolah dan anak 2 orang ber KB.
- c. Keluarga sejahtera 3 adalah mempunyai syarat Keluarga sejahtera 1 dan keluarga sejahtera 2 terpenuhi di tambah dengan meningkatkan pengetahuan agama, memiliki tabungan keluarga, makan bersama sambil berkomunikasi, mengikuti kegiatan masyarakat, rekreasi bersama 6 bulan sekali, memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV majalah dan menggunakan sarana transportasi.
- d. Keluarga sejahtera 3 Plus adalah syarat keluarga sejahtera 1, sejahtera 2, dan sejahtera 3 sudah terpenuhi ditambah dengan memberikan sumbangan materi secara teratur dan aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.
- e. Satu dari 5 indikator keluarga sejahtera 1 (sumber: data PLKB kecamatan Kapontori).

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel 4.12
Tahapan keluarga Sejahtera Desa Barangka

Tahapan Keluarga	Jmlah / Orang
Pra sejahtera	- KK
Sejahtera I	465 KK
Sejahtera II	40 KK
Sejahtera III	18 KK
Sejahtera III Plus	- KK

Sumber : Data P2KP Desa Barangka tahun 2007

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 465 KK yang termasuk keluarga sejahtera satu, 40 KK termasuk keluarga sejahtera dua dan 18 KK termasuk keluarga sejahtera tiga untuk itu masih memerlukan penanganan lebih serius. Keluarga sejahtera satu berjumlah 465 KK adalah Desa Barangka yang merupakan daerah berbatasan langsung dengan daerah laut dan daerah hutan, disamping itu munculnya keluarga baru dari perkawinan yang dimungkinkan masih menggunakan rumah orang tua sebagai tempat tinggal sementara, sehingga dalam pencacatan oleh Petugas Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dengan syarat-syarat tahapan keluarga yang disebutkan di atas hal itulah yang ditemukan di lapangan, demikian yang diuraikan oleh Petugas Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Desa Barangka Kecamatan Kapontori Bidang Sosial.

Persoalan kemiskinan adalah salah satu program yang melekat pada masyarakat. Pengertian kemiskinan itu sendiri menyangkut banyak berbagai macam dimensi. Dimensi kemiskinan dapat diidentifikasi menurut ekonomi, sosial dan politik. Kemiskinan berdimensi ekonomi diartikan sebagai kekurangan sumberdaya

yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Kemiskinan sosial adalah sebagai kekurangan jaringan sosial dan struktur sosial yang didukung untuk mendapatkan kesempatan agar produktivitas seseorang meningkat, dapat dikatakan juga bahwa kemiskinan sosial adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor penghambat sehingga mencegah dan menghalangi seseorang untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan yang tersedia.

Faktor penghambat disini dapat dilihat dari faktor yang datang dari luar kemampuan seseorang misalnya birokrasi atau peraturan resmi yang dapat mencegah seseorang memanfaatkan kesempatan yang ada. Ini biasa disebut dengan kemiskinan struktural yaitu kemiskinan yang dialami oleh suatu kelompok masyarakat atau golongan tertentu yang tidak ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia seperti kekurangan fasilitas pemukiman yang sehat, kekurangan pendidikan, bahkan kekurangan penghidupan yang layak.

Faktor penghambat yang datang dari dalam seseorang atau sekelompok orang misalnya, rendahnya tingkat pendidikan hambatan budaya dalam arti bahwa masyarakat tidak terintegrasi dalam masyarakat luas, apatis dan cenderung menyerah pada nasib, tidak mempunyai daya juang dan kemampuan untuk memikirkan masa depan yang lebih baik. Sedangkan kemiskinan politik adalah menekankan pada derajat akses terhadap kekuasaan (*power*) Secara khusus sulit untuk mengukur kemiskinan politik.

Ada pendapat bahwa kemiskinan politik dapat diukur dari partisipasi masyarakat dalam pemilu misalnya semakin besar proporsi penduduk usia pemilih atau yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dapat dikatakan partisipasi masyarakat dalam pemilu tinggi. Secara garis besar pendekatan kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, *pertama*, pendekatan *poverti threshold* (ambang batas

kemiskinan). Pendekatan ini menekankan pada tingkat hidup seseorang untuk hidup dan mempertahankan hidup. Untuk pendekatan ini dapat diukur dengan melihat beberapa porsi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Nilai ambang batas kemiskinan dapat diukur dengan kebutuhan fisik minimum, ukuran ini sering disebut ukuran kemiskinan *relatif*. Kedua, pendekatan *reciprocal entitlement*.

Pendekatan ini menekankan bahwa kemiskinan merupakan cerminan ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuatan sosial. Basis kekuatan sosial tidak terdapat pada modal yang produktif atau asset, akan tetapi meliputi sumber-sumber keuangan, organi sosial politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, pengetahuan dan keterampilan yang memadai serta informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup (pendidikan, kesehatan, perumahan dan lain-lain).

Dari beberapa ulasan tentang masalah kemiskinan, pemerintah sejak zaman orde baru telah mempunyai beberapa program tentang penganggulangan kemiskinan yang merupakan bagian dari proses pembangunan. Proyek Penaggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) adalah suatu jenis dan bentuk program yang bertujuan membantu masyarakat miskin yang tergabung dalam kelompok swadaya masyarakat (KSM) untuk mendapatkan pendanaan bagi usaha kecil maupun pembangunan/perbaikan sarana dan prasarana dasar lingkungan.

Dalam pelaksanaanya, kelompok swadaya masyarakat tersebut dapat memperoleh bantuan pendanaan berupa pinjaman modal bergulir untuk usaha kecil termasuk untuk biaya pelatihan keterampilan anggota KSM atau hiba untuk pembangunan/perbaikan sarana dan prasarana dasar lingkungan yang turut menunjang kegiatan usaha kecil, jalan, MCK dan jembatan serta usaha lainnya.

Masyarakat yang tergabung dalam KSM mendapatkan kesempatan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan secara adil sesuai dengan usahanya masing-masing.

Penyebab masalah kemiskinan di desa Barangka di kelompokkan dalam tiga kategori yaitu :

1. Bidang Sosial

- a. Bidang Kesehatan dimana masih terdapatnya balita yang bergizi buruk, tingkat kesehatan ibu.
- b. Bidang Pendidikan dimana masih terdapat anak usia sekolah rawan drop out dan bahkan sudah drop out.

Kedua masalah tersebut di atas adalah merupakan akibat:

- Tingginya biaya pengobatan
- Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang program pemerintah di bidang kesehatan
- Kondisi ekonomi masyarakat yang tidak memadai sehingga tidak mampu memperhatikan pentingnya masalah kesehatan dan pendidikan anak.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel 4.13
Warga Miskin yang Mendapat Masalah Kesehatan

No	Masalah	Jumlah	Dusun	Jumlah
1	Balita diberi makanan apa adanya tanpa memperhatikan kandungan gizi karena masalah ekonomi keluarga	180	Dusun Ngkaniu-Niu Dusun Kamelanta Batu Banawa	57 KK 75 KK 48 KK
2	Pengetahuan masyarakat akan pentingnya gizi balita	291 KK	Dusun Ngkaniu-niu Dusun Kamelanta Batu Banawa	74 KK 120 KK 97 KK
3	Meningkatkan kesehatan ibu hamil	15 KK	Dusun Ngkaniu-niu Dusun Kamelanta Batu Banawa	2 KK 8 KK 5 KK
4	Orang tua tidak mampu membiayai anaknya di SD	149 siswa	Dusun Ngkaniu-niu Dusun Kamelanta Batu Banawa	55 siswa 81 siswa 33 siswa
5	Orang tua tidak mampu membiayai anaknya di SMP	49 siswa	Dusun Ngkaniu-niu Dusun Kamelanta Batu Banawa	16 siswa 19 siswa 14 siswa
6	Orang tua tidak mampu membiayai anaknya di SMA	20 Siswa	Dusun Ngkaniu-niu Dusun Kamelanta Batu Banawa	4 siswa 9 siswa 7 siswa

Sumber, P2KP Desa Barangka Tahun 2007

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa masalah balita yang terbesar jumlahnya terdapat di Dusun Kamelanta dengan jumlah 75 KK, masalah gizi balita yang terbesar adalah Dusun Kamelanta 120 KK, Masalah kesehatan ibu hamil yang

terbanyak jumlahnya adalah Dusun Kamelanta 8 KK, masalah pendidikan orang tua tidak mampu yang terbesar jumlahnya adalah Dusun Kamelanta masing-masing SD 81 Siswa, SMP 19 dan SMA 9 Siswa. Hal ini menggambarkan bahwa dusun Kamelanta tingkat pendidikan masyarakatnya masih sangat kurang akibat tingkat pendapatan masyarakat yang tidak memadai sehingga siswa yang berasal dari Dusun Kamelanta rentang dengan drop out dari sekolah.

2. Bidang Ekonomi

Warga Desa Barangka pada bidang ekonomi tidak mampu meningkatkan pendapatan serta warga dalam usia kerja atau usia produktif yang tidak mempunyai pekerjaan dikarenakan:

- Keterbatasan wawasan manajemen sehingga UKM tidak mampu berkembang
- Kelemahan sektor permodalan
- Tidak mempunyai keterampilan
- Terbatasnya informasi lapangan pekerjaan
- Akses pasar dan pemasaran

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel 4.14
Warga Miskin yang Mendapat Masalah Ekonomi

No	Masalah	Jumlah	Dusun	Jumlah
1	Kurang pengetahuan tentang pengelolaan usaha	20 Orang	Dusun Ngkaniu-niu	4 Orang
			Dusun Kamelanta	9 Orang
			Batu Banawa	7 Orang
2	Tidak mempunyai modal usaha	23 Orang	Dusun Ngkaniu-niu	10 Orang
			Dusun Kamelanta	10 Orang
			Batu Banawa	3 Orang
3	Tidak mempunyai keterampilan	96 Orang	Dusun Ngkaniu-niu	74 Orang
			Dusun Kamelanta	10 Orang
			Batu Banawa	12 Orang
4	Tidak mampu memasarkan hasil produk	23 Orang	Dusun Ngkaniu-niu	3 Orang
			Dusun Kamelanta	10 Orang
			Batu Banawa	10 Orang
5	Terbatasnya lapangan pekerjaan	96 Orang	Dusun Ngkaniu-niu	74 Orang
			Dusun Kamelanta	10 Orang
			Batu Banawa	12 Orang
6	Tidak mampu memperbaiki rumahnya karena tidak mempunyai biaya	56 KK	Dusun Ngkaniu-niu	17 KK
			Dusun Kamelanta	29 KK
			Batu Banawa	10 KK

Sumber, P2KP Desa Barangka Tahun 2007

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah yang terbesar mengalami masalah ekonomi adalah Dusun Kamelanta yaitu masing-masing kurang

tentang masalah pengelolaan usaha 9 KK, tidak mempunyai modal usaha 10 KK, tidak mampu memasarkan hasil produk 10 orang, dan tidak mampu memperbaiki rumahnya sendiri 29 KK.

3. Bidang Lingkungan

Pada bidang lingkungan Desa Barangka terdapat sarana dan prasarana lingkungan yang kurang memadai dan butuh penambahan jumlah dan rehabilitasi, seperti sarana air bersih, sarana pembuangan air kotor yang pada umumnya masih sangat kurang, rumah warga miskin yang tidak layak huni dan lain-lain yang erat kaitannya dengan masalah kesehatan lingkungan yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat kemiskinan. Hal ini disebabkan masyarakat tidak dapat membiayai pembangunan dan rehabilitasinya. Untuk itu masyarakat sangat memerlukan bantuan seperti:

1. Bantuan modal usaha
2. MCK
3. Sarana jalan lingkungan
4. Sarana lampu penerang lingkungan
5. Kurang mendapat pelayanan sarana dan prasarana air bersih
6. Rehabilitasi rumah tidak layak huni

Dari keenam program kerja tersebut di atas seperti di ungkapkan oleh salah satu anggota BPD Desa Barangka berikut ini;

“Bantuan yang diberikan oleh Proyek Penanggulangan Kamiskinan di Perkotaan (P2KP) dana sangat terbatas sehingga dengan keterbatasan itu maka kami memandang perlu untuk lebih memprioritaskan bantuan tidak langsung karena dapat karena menyentuh sabagian besar warga miskin dibanding dengan bantuan langsung”

Sehubungan dengan dua informan di atas bahwa warga miskin Desa Barangka kebanyakan tidak memiliki sarana serta kemampuan mengadakan sendiri

karena tingkat ekonomi yang rendah sehingga pengadaannya melalui proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel 4.15
Warga Miskin yang Mendapat Masalah Lingkungan

No	Masalah	Jumlah	Dusun	Jumlah
1	Kurang mendapatkan pelayanan saran dan prasarana air bersih kerana terbatas	291 KK	Dusun Ngkaniu-niu	74 KK
			Dusun Kamelanta	120 KK
			Batu Banawa	97 KK
2	Lahan rumah terbatas tidak ada MCK umum	120 KK	Dusun Ngkaniu-niu	32 KK
			Dusun Kamelanta	46 KK
			Batu Banawa	42 KK
3	Tidak ada sarana pembuangan sampah	291 KK	Dusun Ngkaniu-niu	74 KK
			Dusun Kamelanta	120 KK
			Batu Banawa	97 KK
4	Pembangunan sarana jalan lingkungan	82 KK	Dusun Ngkaniu-niu	32 KK
			Dusun Kamelanta	20 KK
			Batu Banawa	30 KK
5	Penyediaan sarana dan prasarana penerangan lingkungan	291	Dusun Ngkaniu-niu	74 KK
			Dusun Kamelanta	120 KK
			Batu Banawa	97 KK

Sumber, P2KP Desa Barangka Tahun 2007

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Dusun yang jumlah KK terbanyak mendapat masalah seperti:

1. Masalah sarana air bersih adalah Dusun Kamelanta 120 KK
2. Masalah MCK adalah Dusun Kamelanta 46 KK
3. Masalah Pembuangan sampah adalah Dusun Kamelanta 120 KK
4. Masalah sarana jalan lingkungan adalah Dusun Ngkaniu-niu 32 KK.
5. Masalah sarana dan prasarana penerang lingkungan adalah dusun Kamelanta 120 KK.

Secara keseluruhan warga miskin Desa Barangka banyak mengalami masalah, Dusun Ngkaniu-niu, Kamelanta dan Dusun Batu Banawa adalah masalah pembuangan sampah dan lampu penerang lingkungan sebanyak 191 KK. Dari keempat masalah tersebut di atas yang terkecil masalah pembuatan sarana jalan lingkungan dengan jumlah 82 KK dan terbanyak berasal di Dusun Ngkaniu-niu dan Dusun Batunawa dengan jumlah masing-masing 30 KK yang terkecil berada di Dusun Kamelanta dengan jumlah 20 KK.

Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) adalah merupakan program pemerintah dalam rangka membantu warga miskin yang membutuhkan, khususnya di Desa Barangka Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton seperti :

1. Pertanian
2. Nelayan
3. Wira swasta
4. Dagang dan
5. Jasa

Program bantuan ini diperuntukkan bagi tiga dusun yang berada di wilayah Desa Barangka yaitu salah satu desa penerima bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Kapontori. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel 4.16
Daftar warga miskin sasaran Proyek Penanggulangan Kemiskinan di
Perkotaan (P2KP) Desa Barangka Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton
Tahun 2007

No	Nama Dusun	Pekerjaan	Jumlah	Jenis Bantuan
1	Batu Banawa	Tani	44 KK	Raskin
2	Batu Banawa	Nelayan	28 KK	Raskin
3	Batu Banawa	Wira Swasta	7 KK	Raskin
4	Batu Banawa	Dagang	10 KK	Raskin
5	Batu Banawa	Jasa	9 KK	Raskin
6	Kamelanta	Tani	53 KK	Raskin
7	Kamelanta	Nelayan	47 KK	Raskin
8	Kamelanta	Dagang	-	-
9	Kamelanta	Wiraswasta	14KK	Raskin
10	Kamelanta	Jasa	6KK	Raskin
11	Nkaniu-niu	Tani	27KK	Raskin
12	Ngkaniu-niu	Nelayan	39KK	Raskin
13	Ngkaniu-niu	Dagang	2KK	Raskin
14	Ngkaniu-niu	Wiraswasta	2KK	Raskin
15	Ngkaniu-niu	Jasa	6KK	Raskin

Sumber : Data P2KP Desa Barangka tahun 2007

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk Desa Barangka sebagian besar pekerjaannya adalah petani, Dusun Batu Banawa berjumlah 44 KK sesuai dengan letak geografis Dusun Batu Banawa yang jauh dari pesisir atau daerah pegunungan, sehingga jelas mata pencaharian warga dusun di Desa Barangka tergantung dari letak dusun masing-masing. Dusun yang wilayahnya berada pada

daerah pesisir maka sudah tentu berprofesi sebagai nelayan. Warga miskin yang berada di dua kondisi wilayah Dusun tersebut sebagian tidak dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya baik individu maupun secara berkelompok, sehingga keseluruhan masih tergolong sebagai penerima raskin, Seperti yang dituturkan Pengurus P2KP Bidang Sosial berikut ini;

“Memang dalam memberikan bantuan khususnya di Desa Barangka ini harus jeli melihat permasalahan warga yang menjadi sasaran penerima bantuan ini sudah menjadi tugas kami agar supaya bantuan yang diberikan tepat sasaran dan dapat bermanfaat bagi penerima bantuan”

Program bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Desa Barangka memprioritaskan pada penanggulangan kemiskinan yang langsung menyentuh masyarakat miskin namun perlu melihat bahwa tujuan penanggulangan kemiskinan tidak terlepas dari tujuan pemberdayaan yang mendayagunakan dan optimalisasi sumber daya baik alam maupun manusia tersebut untuk dapat lebih meningkatkan kondisi kehidupan masyarakatnya. Program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) harapan masyarakat seperti yang dituturkan seorang relawan Pengurus Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Desa Barangka berikut ini;

“Warga miskin sangat berterimakasih dan program ini sangat baik mudah-mudahan dapat berkelanjutan agar warga miskin yang belum mendapat giliran dibantu dengan bantuan berikutnya sudah dapat semuanya sehingga secara keseluruhan dapat terbantu”

Sehubungan dengan apa yang dituturkan di atas bahwa warga miskin sangat mengharapkan bantuan seperti ini dengan keterbatasan dana maka tidak semua warga mendapat kesempatan untuk menerima bantuan tersebut yaitu harus menunggu giliran untuk itu masih memerlukan waktu yang lama karena harus menunggu pengembalian dari warga yang lain. Pengembalian segera dilakukan jika usaha yang didanai tidak mendapat kendala atau masalah dalam arti berjalan sesuai rencana jika

tidak, bisa saja terjadi pinjaman itu macet dan akhirnya bisa menghalangi keluarga miskin yang lainnya untuk mendapat pinjaman.

Program kerja yang dilakukan oleh Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Desa Barangka adalah merupakan program bantuan dan sangat dibutuhkan oleh warga miskin yang dapat menambah pendapatan serta dapat merubah pola hidupnya. Bantuan dapat diberikan sesuai kebutuhan dan profesinya masing-masing yaitu:

1. Pemberian Modal Usaha
2. Pembuatan MCK
3. Pembuatan sarana jalan lingkungan
4. Pengadaan sarana lampu penerang lingkungan
5. Pembuatan bak penampung air bersih
6. Rehabilitasi rumah tidak layak huni

Keenam program kerja yang diprogramkan oleh Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang merupakan prioritas sesuai kebutuhan warga miskin sebagai sasaran penerima bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Bantuan yang diberikan melalui program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) belum berarti mengingat masih banyak prioritas yang lainnya yang diusahakan pemenuhannya namun disadari semua ini tidak mungkin terpenuhi sekaligus sebab jumlah penduduk miskin sebagai penerima bantuan sangat banyak dan anggaran pemerintah yang terbatas sehingga dalam memenuhi semua kebutuhan warga masyarakat secara keseluruhan dapat diusahakan secara bertahap seperti terlihat pada tabel berikut ini masih banyak program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang belum terlaksana. Lebih jelas terlihat pada tabel berikut ini;

Tabel 4.17
Program Kerja Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)
Desa Barangka Tahun 2007 s/d 2008

Program Kerja	Dusun			Desa Barangka
	Ngkaniu-niu	Kamelanta	Batu Banawa	
Bidang Sosial:				
a. Sunatan Masal	10 Orang	10 Orang	10 Orang	
b. Pelayanan kesehatan	74 KK	120 KK	97 KK	
c. Taman Bacaan	74 KK	120 KK	97 KK	
d. Pembuatan Bak	20 KK	20 KK	20 KK	
e. Pembuatan rehabilitasi beton				74 KK
f. Penigkatan jalan usaha tani				400 m
g. Rehabilitasi rumah tidak layak huni	17 KK	29 KK	10 KK	
h. Pembuatan MCK	17 KK	29 KK	10 KK	
i. Pembuatan tangga dermaga				120 KK
j. Pembuatan saluran air bersih	74 KK	120 KK		
k. Bantuan dana bergulir	10 KK	10 KK	10 KK	30KK
i. Pengadaan sarana penerang lingkungan	20 KK	20 KK	20 KK	
Bidang Pendidikan:				
a. Pengenalan Dasar Komputer	23 Orang	54 Orang	31 Orang	

Sumber: Data P2KP Desa Barangka tahun 2007/2008

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tidak semua program kerja Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dapat dilaksanakan

namun keterbatasan dana bantuan seperti dituturkan oleh koordinator Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Desa Barangka berikut ini;

“Keterbatasan dana yang tersedia pada Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sehingga program yang dilaksanakan berdasarkan sakala prioritas yang dapat menyentuh langsung kepada warga miskin bila warga miskin belum tersentuh semuanya paling tidak sebagian sudah merasakan manfaat bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) tersebut”.

Program kerja yang dapat dilaksanakan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) adalah MCK, rehabilitasi rumah tidak layak huni, sarana jalan lingkungan, lampu penerang jalan lingkungan dan bantuan dana bergulir. Lebih jelas terlihat pada tabel berikut ini;

Tabel 4.18
Proyek yang dilaksanakan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Desa Barangka Kecamatan Kapontori

No	Jenis kegiatan	Volume
1	MCK	11 unit
2	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	70 unit
3	Sarana Jalan lingkungan	400 m
4	Lampu penerang jalan lingkungan	60 unit
5	Bantuan dana bergulir	1 paket
6	Bak penampungan air bersih	6 unit

Sumber: Data P2KP Desa Barangka tahun 2007/2008

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa program kerja yang telah dilaksanakan oleh Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Desa Barangka Kecamatan Kapontori dalam dapat dibagi menjadi dua bagian program kerja yaitu Program Fisik dan Non fisik.

1. Program Fisik yang terdiri dari:
 - a. Pembuatan MCK
 - b. Rehabilitasi rumah tidak layak huni
 - c. Pembuatan jalan lingkungan
 - d. Pengadaan lampu penerang
 - e. Pembuatan bak penampungan air bersih
2. Non Fisik yaitu pemberian tentang dana bergulir yang terdiri dari:
 - a. Bantuan dana yang diperuntukan kepada pedagang atau kios
 - b. Bantuan dana yang diperuntukan kepada warga miskin yang melakukan budi daya agar-agar atau rumput laut.

Program kerja Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Desa Barangka Kecamatan Kapontori yang sangat menyentuh langsung kepada warga miskin adalah program non fisik sebab bantuan langsung dimanfaatkan oleh warga miskin sehingga nampak jelas pada perubahan pola hidup masyarakat tingkat pendapatannya.

Seperti dituturkan warga miskin sebagai penerima bantuan langsung Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) berikut ini;

“saya dengan adanya bantuan Program Proyek Peanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) paling bagus buat saya dan sangat terbantu khususnya penambahan modal usaha”

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sangat dirasakan betapa besar manfaatnya bagi kehidupan masyarakat.

Hal ini tergambar dari penuturan beberapa warga miskin penerima bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sehingga benar-benar Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang sebenarnya.

C. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN

PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP).

Program pengentasan kemiskinan yang ada dan pernah dilaksanakan di Indonesia, misalnya Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan contoh penerapan pembangunan desa terpadu dalam upaya pengentasan kemiskinan yang menggunakan model organisasi berupa Badan Pelaksanaan Pembangunan Desa Terpadu Tingkat Nasional yang kemudian mempunyai jaringan sampai ketingkat bawah.

Sebagai konsekuensinya, secara normatif sangat memperhatikan proses pelaksanaan dari masyarakat atau yang lebih dikenal sebagai mekanisme *bottom up* dibandingkan yang bersifat *top down*. Di samping itu, pelaksanaan ini juga memberikan perhatian bagi tumbuhnya institusi lokal yang diharapkan dapat memfasilitasi mekanisme pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) oleh masyarakat. Dengan tumbuhnya institusi lokal diharapkan usaha pengentasan kemiskinan keberlanjutan dapat terwujud. Walaupun demikian, apakah prinsip-prinsip normatif tersebut juga terwujud dalam pelaksanaannya?, atau apakah *das sollen* sesuai *das sein*?, memang perlu dikaji melalui studi evaluasi dan *monitoring* dalam pelaksanaannya. Soetomo, (2006:218).

Masalah kemiskinan di Indonesia saat ini dirasakan sudah sangat mendesak untuk ditangani. Krisis Ekonomi dan Moneter yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 telah mengecilkkan arti berbagai pencapaian pembangunan. Kemiskinan merupakan persoalan struktural dan multi dimensial mencakup politik, sosial,

ekonomi, aset dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari dimensi-dimensi kemiskinan tersebut muncul dalam berbagai bentuk yaitu:

a. Dimensi politik.

Dimensi politik muncul akibat ketidakadilan yang dirasakan dalam berbagai perlakuan dalam wadah organisasi yang tidak mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin, sehingga mereka benar-benar tersingkir dari proses pengambilan keputusan. Masyarakat miskin hal itu merupakan yang sangat penting, sebab hal tersebut menyangkut harga diri mereka.

b. Dimensi sosial.

Dimensi sosial sering muncul dalam bentuk tidak terintegrasikannya masyarakat miskin kedalam institusi sosial yang ada dan terinternalisasikannya budaya kemiskinan yang merusak kualitas manusia maupun etos kerja mereka.

c. Dimensi ekonomi.

Dimensi Ekonomi muncul dalam bentuk rendahnya penghasilan, mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya sampai batas yang layak.

d. Dimensi aset.

Dimensi aset ditandai dengan rendahnya kepemilikan masyarakat miskin terhadap berbagai hal, termasuk aset yang bisa dijadikan sebagai modal hidup masyarakat, baik aset kualitas sumber daya manusia, peralatan kerja, modal kerja, dan sebagainya.

Karakteristik kemiskinan seperti tersebut di atas dan krisis ekonomi yang terjadi telah menyadarkan semua pihak bahwa pendekatan dengan cara yang dipilih dalam penanggulangan kemiskinan selama ini perlu diperbaiki ke arah pengokohan kelembagaan masyarakat. Keberadaan kelembagaan masyarakat ini dibutuhkan dalam rangka membangun organisasi kaum miskin yang mandiri, berkelanjutan

dalam menyalurkan aspirasinya serta mereka mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Upaya pengokohan perannya sebagai salah satu penggerak dalam "melembagakan" dan "memberdayakan" kembali nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan sebagai nilai utama melandasi aktivitas penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat sendiri di desa mereka. Sehingga diharapkan tidak ada lagi kelompok masyarakat yang masih terjebak kedalam lingkungan kemiskinan yang pada gilirannya diharapkan dapat tercipta lingkungan kota/desa dengan perumahan yang lebih layak huni di dalam pemukiman yang responsif, dengan sistem sosial masyarakat yang lebih memadai melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Model tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai penyelesaian persoalan kemiskinan yang bersifat multi dimensional dan struktural khususnya yang terkait dengan dimensi politik, sosial, dan ekonomi.

Di samping itu, dalam jangka panjang pemerintah mampu menyediakan aset yang lebih baik bagi masyarakat miskin dalam meningkatkan pendapatan maupun menyalurkan aspirasinya dalam pengambilan keputusan. Mengingat Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan landasan atau pemicu tumbuhnya sinergi gerakan bersama dalam menanggulangi kemiskinan.

Untuk itu dalam mengukur tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Hillhorst dan Kakter, (1985:28) mengemukakan tiga pendekatan yang berbeda dalam menyusun indikator kesejahteraan. Pendekatan pertama adalah indikator yang memungkinkan dapat diukur dengan nilai uang, seperti GNP, pendekatan kedua adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kondisi sosial yang sering disebut dengan indikator objektif, dan pendekatan ketiga adalah indikator yang dapat

digunakan untuk mengetahui persepsi masyarakat atau penilaian masyarakat terhadap kesejahteraannya yang sering disebut dengan indikator subjektif.

Sehubungan dengan ketiga pendekatan di atas maka kesejahteraan dapat digambarkan dengan berbagai hal seperti tingkat kesehatan, makanan dan gizi, perumahan, pakaian, dan tersedianya air bersih. Kenyataan ini dapat menggambarkan realitas kehidupan masyarakat yang ada. Sementara itu, taraf hidup dan kesejahteraan dapat diukur dari persepsi dan pendapat warga masyarakat sendiri tentang kondisi kehidupannya. Tujuan utamanya adalah mengetahui tingkat kepuasan masyarakat tentang kondisi kesejahteraannya secara keseluruhan.

Pengukuran tingkat kesejahteraan melalui *Physical Quality of Life Indeks* (PQLI) atau indeks mutu hidup. *Physical Quality of Life Indeks* (PQLI) adalah suatu indeks pengukuran yang terdiri dari tiga komponen yaitu harapan hidup sejak usia satu tahun, tingkat kematian bayi dan melek huruf, ketiga komponen diukur mengikuti skala 0 sampai 100 dan dijumlahkan kedalam satu indeks tunggal Sjahrir, (1986:44).

Sementara itu Hardiman dan Migley, (1982:33) membedakan tiga pendekatan dalam mengukur kebutuhan pokok yang identik dengan kemiskinan. Ketiga pendekatan tersebut adalah pengukuran garis kemiskinan, indikator taraf hidup dan indikator ketimpangan. Indikator kemiskinan menggunakan asumsi pada tingkat pendapatan atau *income* tertentu seseorang dapat hidup secara minimal sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Sajogyo kemudian membuat ukuran garis kemiskinan tidak dari pendapatan tetapi dari konsumsi perkapita per tahun dalam nilai setara beras.

Dengan melihat tiga pendapat di atas tentang konsep kesejahteraan maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan adalah perubahan pola hidup baik secara

individu maupun kelompok. Tujuan pembangunan pada umumnya dan pembangunan masyarakat desa pada khususnya adalah meningkatkan kesejahteraan atau peningkatan taraf hidup masyarakat. Memang benar, pengertian taraf hidup masyarakat maupun kesejahteraan masyarakat mempunyai berbagai dimensi. Beberapa pihak beranggapan bahwa pengertian kesejahteraan mengarah kepada dimensi fisik, ekonomi, mental dan sosial. Dengan menggunakan ukuran relatif dapat dikatakan bahwa kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat akan meningkat apa bila semakin banyak kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi.

Oleh sebab itu, peningkatan kesejahteraan dapat juga diartikan sebagai suatu usaha untuk dapat memenuhi semakin banyak aspek kebutuhan tersebut. Walaupun diakui bahwa kesejahteraan masyarakat mempunyai berbagai dimensi, banyak pendapat yang mengatakan bahwa dimensi ekonomi memegang peranan yang cukup penting karena dapat menjadi sarana dan pendorong bagi pemenuhan kebutuhan pada dimensi yang lain. Apa bila pendapat tersebut dikuti maka dapat dipahami pernyataan bahwa prasyarat utama agar masyarakat banyak memenuhi kebutuhannya dalam berbagai dimensi adalah peningkatan pendapatan. Oleh sebab itu, persoalan utama dalam proses pembangunan termasuk pembangunan masyarakat adalah bagaimana mengupayakan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat secara cepat, sehingga masyarakat akan berpeluang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya lebih banyak lagi.

Sehubungan dengan hal tersebut maka pemberdayaan yang berarti pembagian kekuasaan politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap "proses dan hasil pembangunan". Dalam perspektif lingkungan, pemberdayaan mengacu pada pengamanan akses terhadap sumberdaya alami dan pengelolaan secara berkelanjutan, sehingga pemberdayaan

dapat mendorong terjadinya inisiatif dan respons dari masyarakat, sehingga apa yang menjadi kehendak masyarakat dalam memecahkan masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan cepat dan fleksibel.

1. Sosialisasi Program Pelaksanaan Proyek Penanggulangan

Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).

Sosialisasi pada umumnya dimulai dari kegiatan memasyarakatkan sesuatu hal yang mengandung makna proses menjadi tahu, paham dan ditumbuhkan kesadaran bersikap dan berperilaku atas suatu pesan atau misi yang ingin disampaikan. Dalam proses sosialisasi menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman dalam masyarakat tentang visi, misi, strategi, tujuan sasaran, prinsip asas dan mekanisme pelaksanaan.

Bagi masyarakat kegiatan sosialisasi memiliki nilai strategis dalam menyampaikan pesan tentang Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai program yang bertumpu pada masyarakat (*community based development*). Sebagai program yang disediakan untuk, dan oleh masyarakat, mengedepankan nilai peran aktif serta memberi pemahaman bahwa peluang tersebut dapat diperoleh dengan prosedur sebagai mana telah disusun oleh Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).

Dengan demikian masyarakat menjadi paham hak dan kewajibannya serta syarat-syarat untuk memperoleh peluang tersebut, yang pada gilirannya mendorong terjadinya proses pembelajaran masyarakat. Lebih dari itu pemahannya masyarakat hak dan kewajibannya akan dapat menumbuhkan sikap proaktif masyarakat akan kontrol sosial. Oleh itu keberhasilan sosialisasi membawa dampak yang sangat penting dalam menunjang efektifitas pelaksanaan program Proyek Penanggulangan

Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Seperti yang dituturkan warga miskin penerima bantuan modal usaha berikut ini;

“Kami sangat sadar bahwa bantuan ini bukan hadiah akan tetapi hanya bantuan modal dan harus dikembalikan sesuai jangka waktu yang ditentukan dan kami sadar pula bahwa kemudahan dalam memperoleh bantuan sangat kami harapkan sehingga kehidupan kami bisa meningkat”

Bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) faktor utama dalam mengembangkan misi pelaksanaannya adalah melalui sosialisasi dengan membutuhkan sistem monitoring yang lebih sehat dan dinamis. Pelaku dan penerima bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) menjadi kunci keberhasilan program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) terutama dalam mencapai sasaran dan tujuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Ada beberapa alasan yang harus diperhatikan.

- a. Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) didesain sebagai program yang berbasis kepada *community based development*, di mana masyarakat menjadi aktor utama dalam membangun sistem manajemen pelaksanaan secara efektif, modal awal bagi ketepatan dalam mengambil keputusan, di samping itu potensinya dalam fungsi kontrol sosial lebih mudah dikembangkan sehingga mekanisme monitoring dari dan oleh masyarakat dapat berjalan.
- b. Terjadinya penguatan peran masyarakat membawa konsekuensi pengawasan peran serta aparatur pemerintah yang akibatnya pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator.

2. Partisipasi Masyarakat Terhadap Program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)

Partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam suatu program adalah merupakan salah satu prasyarat utama untuk keberhasilan program yang

bersangkutan. Tanpa adanya partisipasi masyarakat setiap program tidak ada artinya karena itu program pengembangan partisipasi masyarakat sangat menentukan khususnya dalam kegiatan pelaksanaan program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), partisipasi masyarakat didasari oleh misi dan strategi program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang tersosialisasi dengan baik dimasyarakat. Partisipasi masyarakat dalam program Proyek Penanggulangan Kemiskiaann di Perkotaan (P2KP) sangat dibutuhkan sejak diluncurkannya program, masyarakat sangat antusias untuk terlibat dalam kegiatan, dibuktikan dengan banyaknya anggota masyarakat yang terlibat dalam kelompok, Baik kelompok pembangunan fisik maupun kelompok ekonomi produktif atau pembangunan non fisik.

3. Kelembagaan masyarakat yang efektif.

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) adalah adanya kelembagaan masyarakat yang mengakar dalam arti bahwa lembaga itu ada dari, oleh dan untuk masyarakat itu sendiri. Kelembagaan seperti BKM maupun KSM ditentukan sendiri oleh masyarakat. Kelembagaan masyarakat tersebut banyak diantara mereka (masyarakat) yang merasa terbantu dan dapat memecahkan masalah. Kelembagaan BKM yang dibentuk masyarakat itu sendiri mengembang visi dan misi dari program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yaitu dengan jalan memberdayakan masyarakat dan penguatan institusi masyarakat sipil. Kelembagaan masyarakat yang efektif dan aspiratif sehingga keberadaan program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) khususnya dimasyarakat Desa Barangka lebih berdaya guna dan berhasil guna sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

4. Kemudahan Dalam Memperoleh Bantuan

Dalam mendorong masyarakat ikut terlibat dalam kegiatan program dalam menentukan keberhasilan program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di perkotaan (P2KP) adalah adanya kebijakan dari pelaksanaan yang memudahkan masyarakat dalam memperoleh bantuan. Dalam program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) masyarakat pada umumnya sangat mudah dalam memperoleh bantuan oleh pengurus BKM Desa Barangka, dengan mudahnya mendapat bantuan tersebut masyarakat secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya sebab modal usaha yang diterimanya sangat membantu pertumbuhan ekonomi warga miskin.

5. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat dalam usaha mengembalikan angsuran khususnya bantuan dana bergulir yang diterima merupakan salah satu faktor yang menunjang kelancaran pelaksanaan Program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Pemberian bantuan kepada warga miskin untuk modal awal maupun penambahan modal usaha dengan jalan meminjam KBM dengan jangka waktu yang telah ditentukan sehingga kesadaran warga sangat penting artinya demi peningkatan pendapatan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk mengembalikan pinjaman sangat penting sebab jika tidak lama-kelamaan dana akan habis dan dapat memengaruhi kegiatan yang lainnya. Oleh karena itu kesadaran warga penting baik yang terlibat dalam kelompok peminjam maupun kelompok umum lainnya untuk saling mengingatkan maksud dan tujuan dana yang digulirkan.

Namun kenyataan dilapangan untuk pengembalian dana bergulir baik bantuan usaha dagang maupun bantuan usaha budidaya agar-agar/rumput laut Desa

Barangka masih kategori baik dan sesuai kenyataan yang ada bantuan yang diberikan melalui Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dapat menambah modal usaha dan pendapatan.

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) tidak luput dari hal sebagai berikut:

1. Mekanisme yang terlalu rumit.
2. Terbatasnya dana yang tersedia sehingga belum menjangkau secara keseluruhan warga miskin yang ada di Desa Barangka yang menjadi sasaran bantuan.
3. Belum terserapnya seluruh masyarakat yang merupakan sasaran program sehingga sulitnya program berjalan dengan baik dan masih kurang pahamiya sebagian masyarakat mengenai tujuan program pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskiaan di Perkotaan (P2KP) yang telah disosialisasikan sehingga masyarakat beranggapan bahwa bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dapat diketahui jika ada program fisik seperti jalan, MCK maupun sarana fisik lainnya. Dari beberapa kendala di atas jika ditangani secara baik dan dilakukan penyempurnaan sehingga dapat menyelesaikan persoalan warga miskin dengan baik.

Seperti dituturkan warga miskin penerima bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) berikut ini;

“Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) manfaatnya sangat besar yaitu dalam segi pelayanan masyarakat sehingga dengan Program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sungguh senang dan sangat membantu”

Hal terpenting yang perlu dilakukan agar program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) bermanfaat bagi masyarakat adalah bagaimana mengelolah dana yang kecil namun manfaatnya besar sehingga dalam program

mengutamakan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan warga miskin. Perlu disadari bahwa dana bantuan bukan hiba, jika dipahami oleh seluruh warga miskin penerima bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sehingga pengelolaannya berjalan sesuai mekanisme yang ada.

D. PELAKSANAAN PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP) DESA BARANGKA KECAMATAN KAPONTORI KABUPATEN BUTON.

Pelaksanaan Proyek Penanggulangan kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Desa Barangka mempunyai manfaat yang sangat penting dan sangat besar pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan perubahan kondisi kehidupan masyarakat yang mendapat bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan(P2KP) kearah lebih baik.

Program Proyek Penanggulangan kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Desa Barangka kecamatan Kapontori diantaranya adalah:

1. Bidang Ekonomi

Proyek Penanggulangan kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Desa Barangka di bidang ekonomi yaitu bantuan modal usaha dalam rangka membantu warga miskin untuk menambah modal usaha. Bantuan modal usaha dibagi dalam dua bidang usaha yaitu usaha dagang/kios dan usaha budi daya agar-agar atau rumput laut.

a. Bantuan Modal Usaha Bidang Usaha Dagang/Kios

Bantuan dana dalam bidang usaha dagang berjumlah 3 KK dengan jumlah bantuan sebesar 500 ribu rupiah hal ini sangat membantu bagi warga walaupun dana bantuan yang diterima sangat kecil tetapi sangat dibutuhkan untuk menambah modal usaha, menurut warga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengembangan usaha sebab dana yang diberikan sebesar Rp.500 ribu yang dapat

diangsur perbulan sesuai aturan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) belum dapat menyelesaikan masalah warga miskin secara keseluruhan. Seperti dituturkan warga miskin penerima bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) modal usaha (Kios).berikut ini;

“Saya sangat terbantu dengan adanya modal usaha (Kios) apalagi pada saat itu saya sangat butuhkan walaupun kecil bantuannya tapi bagi saya sangat membantu namun saya menyarankan kalau bisa dimasa yang akan datang bisa lebih besar lagi bantuannya agar bisa usaha lebih besar lagi dan dapat membantu seluruh warga miskin yang membutuhkannya. Dulu pondok-pondok saya tidak banyak isinya sekarang sudah bertambah dan buat saya cukup”.

Seperti terlihat pada Gambar/Foto berikut ini;



Gambar/foto 4.4 Kios yang mendapat bantuan modal usaha dari Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)

Gambar/Foto di atas menunjukkan bahwa bantuan pada prinsipnya sangat dibutuhkan oleh setiap warga miskin atau usaha kecil seperti usaha Kios apalagi dapat menyentuh langsung kepada kehidupan pribadi. Seiring dengan kondisi kehidupan yang sangat sulit apalagi untuk membangun usaha sendiri harus

menggunakan modal yang cukup namun untuk meminjam ke pihak ketiga khususnya Bank harus menggunakan agunan sebagai jaminan kredit namun warga tidak memilikinya. Bantuan dana bergulir 1 paket yang diperuntukan 30KK sangat penting dan merupakan satu-satunya jalan untuk dapat meningkatkan pendapatan sehingga dapat merubah pola hidup warga miskin di Desa Barangka khususnya bagi mereka yang memiliki bidang usaha dagang/kios dan membuka usaha budidaya agar-agar.

Seperti dituturkan warga miskin penerima bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) bidang usaha jual beli ikan berikut ini;

“Saya sangat terbantu dengan adanya bantuan dana bergulir sebab saya meminjam uang untuk memperbesar modal usaha saya walaupun kecil bantuannya tapi digunakan pada saat yang tepat maka sangat berarti bagi saya. Harapan saya kedepannya bantuan ini dapat di tambah atau diperbanyak”

Hal senada juga dituturkan warga miskin penerima bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) bidang usaha dagang (penjual Ikan) berikut ini;

“Saya sangat terbantu dengan adanya bantuan modal usaha sebab saya meminjam uang untuk memperbesar modal usaha saya jual beli ikan walaupun kecil bantuannya tapi digunakan pada saat yang tepat maka sangat berarti bagi saya. Harapan saya kedepannya bantuan ini dapat di tambah atau diperbanyak”.

Sejalan dengan penuturan beberapa warga miskin penerima bantuan modal usaha dagang (penjual ikan) di atas bahwa Program Bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Desa Barangka, bantuan dana bergulir khususnya untuk usaha dagang, dana yang diberikan kepada warga miskin sangat kecil sehingga warga miskin yang mendapat bantuan sangat sedikit jumlahnya, hal ini disebabkan dana yang diterima oleh Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sangat sedikit tidak sebanding dengan jumlah warga miskin yang perlu mendapat bantuan.

Dengan melihat tiga penuturan warga miskin sebagai penerima bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) bidang usaha, Kios, Jual Beli Ikan dan Jual Beli Roti sangat membantu. Bantuan modal usaha yang digulirkan melalui Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sangat efektif jika dimanfaatkan dengan baik.

Untuk lebih jelas terlihat pada tabel berikut ini;

Tabel 4.19
Perubahan tingkat pendapatan warga penerima bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) modal usaha bidang usaha jual beli/bulan

No	Usaha	Dusun	Sebelum	Sesudah	Tambahan
1	Kios	Kemelanta	500.000	875.000	375.000
2	Jual Beli Roti	Ngkaniu-niu	350.000	600.000	250.000
3	Jual Beli Ikan	Batu Banawa	600.000	1.000.000	400.000

Keadaan tahun 2009.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebesar Rp.500.000 untuk jual beli dari ketiga bidang usaha di atas terlihat jelas usaha yang terkecil memperoleh tambahan penghasilan setelah mendapatkan dana bantuan Rp.500.000 dari Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) adalah Usaha jual beli roti hal ini dikarenakan warga yang usaha roti sangat banyak tidak sebanding dengan pembeli atau konsumen (roti), sedang yang mendapat tambahan penghasilan terbesar hampir sama dengan besarnya bantuan yang diperoleh dari Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) adalah Pedagang Ikan hal ini dikarenakan pedagang ini tidak menetap satu tempat akan tetapi berkeliling dari kampung ke kampung bahkan kedaerah perkotaan seperti kota Baubau dan menjual ikan dengan harga dua

sampai tiga kali lipat dari harga belinya. Melihat kenyataan ini bahwa walaupun sedikit bantuan yang diperoleh namun sangat bermanfaat bagi keluarga miskin dalam rangka meningkatkan pendapatan sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraannya.

b. Bantuan Modal Usaha Bidang Usaha Budi Daya Agar-agar

Bantuan budidaya rumput laut bagi masyarakat desa barangka sangat tepat melihat kehidupan masyarakat yang sebagian besar penduduknya bermukim di wilayah pesisir. Penerima bantuan budi daya agar-agar berjumlah 5KK. Kehidupan warga miskin penerima bantuan modal budidaya agar-agar awalnya adalah nelayan pencari ikan namun dengan adanya beberapa penyuluhan dari pihak perikanan Kabupaten Buton bahwa kondisi laut di pesisir wilayah Desa Barangka sangat bagus dan subur bila dijadikan sebagai lahan budi daya agar-agar atau rumput laut, untuk itu berkat bantuan Program Bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) maka masyarakat pesisir mulai beralih dari nelayan kebudidaya agar-agar atau rumput laut. Seperti dituturkan warga miskin penerima bantuan modal usaha budidaya agar-agar berikut ini;

“Saya sangat terbantu dengan adanya modal usaha agar-agar apalagi pada saat itu saya sangat butuhkan bantuan modal walaupun kecil bantuannya tapi bagi saya sangat membantu namun saya menyarankan kalau bisa dimasa yang akan datang bisa lebih besar lagi bantuannya agar bisa usaha lebih besar lagi”

Senada dengan hal tersebut diatas juga dituturkan warga miskin penerima bantuan modal usaha budidaya agar-agar berikut ini;

“Saya sangat terbantu dengan adanya bantuan dana bergulir sebab saya meminjam uang untuk memperbesar modal usaha saya sangat susah untuk itu walaupun kecil bantuannya tapi digunakan pada saat yang tepat maka sangat berarti bagi saya. Harapan saya kedepannya bantuan ini dapat di tambah atau diperbanyak”.

Dengan meperhatikan penuturan beberapa warga miskin sebagai penerima bantuan modal usaha budi daya agar-agar sangatlah berarti untuk pengembangan

usaha dalam meningkatkan pendapatan. Kemudahan dalam menerima bantuan modal usaha dapat memberikan dampak yang positif seperti yang dituturkan warga miskin penerima bantuan modal usaha budi daya agar-agar berikut ini;

“Memang sangat membantu saya untuk menambah modal usaha budidaya agar-agar walaupun batuan sedikit tetapi sangat membantu untuk menambah modal usaha saya. Untuk saya sangat berterimakasih kepada pemerintah khususnya Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pengurus untuk memperoleh bantuan”.

Bantuan tambahan modal maupun modal awal untuk budidaya agar-agar atau rumput laut seperti yang tampak pada gambar/foto berikut ini yang merupakan areal budidaya agar-agar atau rumput laut penduduk Desa Barangka yang menerima bantuan modal usaha merupakan bantuan dana bergulir Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).



Gambar/Foto 4.6 Areal budi daya agar-agar bagi warga miskin yang mendapat bantuan dana bergulir Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)

Berdasarkan gambar/Foto di atas menunjukkan bahwa kawasan ini adalah kawasan yang sangat strategis bagi budi daya agar-agar/rumput laut, perairan dengan kondisi seperti ini merupakan kawasan yang tepat untuk budi daya agar-agar. Ditinjau dari segi arus dan gelombang memungkinkan untuk dapat melakukan pembudidayaan agar-agar/rumput laut sepanjang tahun, areal ini berupa selat kecil di antara Pulau Buton dan sebuah pulau kecil bernama Pulau Panjang, seperti yang dituturkan warga miskin yang mendapat bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) berikut ini;

“Saya sebagai warga miskin sangat terbantu dengan bantuan yang diberikan oleh Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) karena saya tidak akan mengetahui cara perawatan dan pengukuran agar-agar yang baik dan benar sehingga dengan adanya budi daya ini saya tahu cara budi daya yang baik, sehingga hasil panen saya bertambah dan pendapatan saya sudah meningkat”.

Budi daya agar-agar sejak lama dilakukan oleh warga namun dalam skala kecil dan bukan merupakan usaha utama akan tetapi merupakan sampingan sehingga pendapatan pun kecil. Budi daya agar-agar melalui bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sangat positif untuk menambah modal dan menjadikannya usaha budi daya agar-agar sebagai usaha utama sehingga hasil panen pun bertambah sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

Seperti tampak pada gambar/Foto berikut ini;



Gambar/Foto 4.7 Hasil budi daya agar-agar bagi warga miskin yang mendapat bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)

Berdasarkan gambar/Foto di atas menunjukkan hasil panen agar-agar atau rumput laut setelah mendapat bantuan modal usaha. Agar-agar yang tampak pada penjemuran ini adalah hasil panen budi daya agar-agar warga miskin yang telah mendapat bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Hasil panen salah seorang warga yang mendapat bantuan dana bergulir untuk usaha budi daya agar-agar atau rumput laut telah mengalami peningkatan. Hasil agar-agar atau rumput laut yang tampak di atas adalah rumput laut dipanen dengan umur 40 hari. Bila melihat kenyataan budi daya agar-agar/rumput laut untuk mendapatkan hasil panen yang baik maka dipandang perlu untuk mengikuti pelatihan tentang budi daya agar-agar atau rumput laut dan lebih penting lagi adalah masyarakat harus diberi dana bantuan/modal usaha yang memadai. Karena ada sebagian masyarakat masih

belum tahu bagaimana proses budi daya agar-agar atau rumput laut dan tidak memiliki modal kerja. Seperti yang dituturkan warga miskin penerima bantuan modal usaha budidaya agar-agar berikut ini;

“Sebelum saya dibantu dengan modal dari program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Desa Barangka saya belum pernah menjemur agar-agar sebanyak ini disamping itu saya juga belum tahu cara memilih bibit yang baik dan cara budi daya agar-agar atau rumput laut dengan benar, tetapi berkat bantuan dan hasilnya cukup memadai untuk hidup saya sehari-hari, jika tidak ada bantuan ini maka saya tidak akan berubah seperti ini juga teman-teman saya yang lainnya”.

Budidaya agar-agar sangat penting artinya bagi warga miskin yang bekerja sebagai petani agar-agar. Bantuan modal usaha untuk menambah volume usaha sangat besar manfaatnya sehingga dalam pengembangan usaha secara besar-besaran dan terus menerus harus mendapat perhatian serius dari pemerintah terutama pemerintah Kabupaten Buton untuk segera mengambil langkah jika perlu bantuan jangan hanya melalui bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) tentang modal usaha akan tetapi pelatihan tentang cara budi daya agar-agar yang baik dan benar juga sangat penting untuk menambah pengetahuan tentang budidaya agar-agar tersebut; seperti dituturkan warga miskin penerima bantuan modal usaha budidaya agar-agar berikut ini;

“Pemberian modal usaha dan pelatihan dua hal yang tidak terpisahkan dan sangat menunjang satu sama lain. Pelatihan sangat penting untuk menambah pengetahuan tentang budi daya agar-agar, saya sangat berterimakasih kepada pemerintah yang telah memberikan pelatihan kepada saya tentang bagaimana cara budi daya agar-agar yang baik dan penghasilan saya meningkat/bertambah”

Bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) penambahan modal budi daya agar-agar sebesar Rp.400.0000, dan pelatihan tata cara budi daya agar-agar yang baik Rp.500.000, sangat membantu warga miskin untuk menambah volume usaha dan meningkatkan hasil panen sehingga dapat

merubah pola hidup masyarakat miskin dan pendapatan meningkat sekaligus harapan pemerintah tentang kesejahteraan bersama segera terwujud.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table berikut ini;

Tabel 4.20
Warga penerima bantuan modal usaha budi daya
agar-agar Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)
pendapatan tambahan/bulan

No	Usaha	Dusun	Sebelum	Sesudah	Tambahan
1	Budi daya agar-agar	Ngkaniu-niu	Rp.300.000	Rp.600.000	Rp.300.000
2	Budi daya agar-agar	Kamelanta	Rp.500.000	Rp.800.000	Rp.300.000
3	Pelatihan budi daya agar-agar	Batu Banawa	Rp.500.000	Rp.900.000	Rp.400.000

Keadaan tahun 2009.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh nampak jelas bahwa bantuan yang diberikan oleh Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sangat menguntungkan bagi petani agar-agar atau rumput laut yaitu dilihat dari perubahan pendapatan namun bagi seseorang yang mengikuti pelatihan budi daya agar-agar sangat memegang peranan penting hal ini terlihat perbedaan pendapatan antara warga yang mengikuti pelatihan dan yang tidak mengikuti pelatihan. Oleh karena itu dengan adanya bantuan Proyek Penanggulan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) baik bantuan modal usaha maupun pelatihan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan pengetahuan budi daya agar-agar

yang sebenarnya sehingga berpengaruh pada peningkatan pendapatan masyarakat sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraannya.

2. Bidang Sosial.

a. Pembuatan Fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK)

Sesuai dengan Program Kerja Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Desa Barangka adalah pembuatan MCK sangat penting artinya bagi warga miskin yang selama ini tidak memiliki MCK. Pengadaan MCK Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) berjumlah 6 unit di mana MCK ditempatkan pada masing-masing dusun yaitu 2 unit di Dusun Batu Banawa dengan melayani 24 KK, 2 unit di Dusun Kamelanta dengan melayani 34 KK dan 2 unit Dusun Ngkaniu-niu dengan melayani 31 KK di mana satu buah MCK dapat melayani enam sampai dengan tujuh kepala keluarga untuk itu MCK yang dibangun masih jauh dari rasiona jumlah KK yang dilayaninya. Tujuannya adalah untuk memudahkan warga miskin yang selama ini tidak menggunakan MCK, bila ini dilakukan yaitu dilaut dan di hutan dengan bertambahnya jumlah penduduk serta pemukiman warga maka hal tersebut menjadi pertimbangan oleh Pengurus Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sehingga bersama-sama dengan warga sepakat untuk membuat MCK dalam rangka mengantisipasi penularan wabah penyakit dan dampak sosial lainnya. MCK sangat besar manfaatnya oleh warga terutama warga yang tidak mempunyai MCK dirumah. Senada dengan hal tersebut dituturkan oleh warga miskin yang mendapat bantuan MCK melalui bantuan program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) berikut ini;

“Bantuan ini bagi saya sangat bermanfaat karena selama ini jika ingin melakukan buang hajat saya harus menuju ke laut atau ke hutan tapi kini dengan adanya MCK dekat rumah, saya merasa tidak kesulitan lagi jika hendak buang hajat, rumah saya sangat dekat dengan MCK sehingga saya sangat berterima kasih kepada Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang telah mendanakan MCK bagi warga miskin”

Program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) memprogramkan pengadaan MCK memang sangat tepat dan manfaatnya sangat dirasakan oleh warga miskin namun bukan hanya warga yang diperuntukan oleh Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) akan tetapi semua warga yang berada disekitar MCK tersebut ikut merasakan manfaatnya, bahkan warga masyarakat lain yang tidak termasuk dalam kategori warga miskin ikut merasakan manfaatnya, karena MCK berada di pinggir jalan utama yakni jalan yang menghubungkan Baubau Kapontori, seperti dituturkan warga miskin penerima bantuan MCK warga dusun Ngkaniu-niu berikut ini:

“Saya juga sangat merasakan manfaat MCK yang dibangun oleh Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) desa Barangka walaupun MCK ini hanya diperuntukan untuk keluarga miskin tapi saya tidak dilarang jika saya mau menggunakannya untuk itu saya sangat mendukung dan berterima kasih sekali kepada pemerintah khususnya pada bantuan yang diberikan melalui program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)”.

Seperti tampak pada gambar/foto berikut ini;



Gambar/Foto 4.8 MCK yang dibangun oleh Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang diperuntukan bagi warga miskin

Berdasarkan gambar/Foto di atas bahwa juga dituturkan warga miskin penerima bantuan manfaat MCK melalui program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) berikut ini;

“Saya sebagai warga masyarakat sangat merasakan manfaat program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Desa Barangka tentang pembuatan MCK yang selama ini tidak bisa membuat MCK sendiri karena faktor kemampuan ekonomi yang tidak mungkin bisa membuat sendiri disamping itu disadari dengan adanya MCK keadaan lingkungan bersih terhindar dari gangguan dan kotor yang dapat menimbulkan berbagai penyakit”.

Senada dengan hal tersebut diatas juga dituturkan warga miskin yang menerima manfaat bantuan MCK dari Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) berikut ini;

“Saya sangat harapkan agar bantuan MCK ini kedepannya ditambah lagi sehingga dapat terjangkau oleh seluruh warga miskin yang tidak memiliki MCK”

Dari beberapa hal yang dituturkan oleh warga miskin di atas maka jelaslah bahwa bantuan MCK sangat dibutuhkan dan besar manfaatnya yang dirasakan oleh warga miskin, salah satunya adalah MCK yang nampak pada gambar/foto di atas yang merupakan bantuan Program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang berjumlah 6 unit yang tersebar di tiga Dusun yaitu Dusun Ngkaniu-niu, Dusun Kamelanta dan Dusun Batu banawa. MCK yang nampak pada gambar/foto diatas berada pada Dusun Kamelanta sehingga warga miskin yang menerima manfaat bantuan MCK sebagian jauh dari rumahnya, seperti yang dituturkan warga miskin penerima manfaat bantuan MCK berikut ini;

“memang pada dasarnya saya sangat senang dengan bantuan MCK agar kesehatan dalam lingkungan terjamin namun masih terlalu jauh dari rumah saya”

MCK yang dibangun melalui bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) ada yang tidak berfungsi sebagai mana layaknya MCK yang lainnya karena bebrbagai faktor seperti tampak gambar/Foto MCK dibawah ini;



Gambar/Foto 4.9 MCK yang dibangun oleh Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang diperuntukan bagi warga miskin namun letaknya tidak tepat.

Berdasarkan gambar/Foto di atas bahwa MCK yang tidak difungsikan lagi oleh warga. MCK yang tampak adalah merupakan MCK yang dibangun tidak sasaran atau kesalahan prosedur dimana tidak dilengkapi dengan sarana air bersih yang langsung mengalir ke dalam MCK tersebut di samping itu penempatan MCK tersebut sangat tidak strategis di mana berada di depan rumah warga. MCK tersebut kondisinya tidak terawat lagi seperti layaknya MCK lainnya. Tampak jelas bahwa kesadaran warga masyarakat akan pentingnya kebersihan sangat kurang terlebih lagi untuk mencegah berjangkitnya wabah penyakit masih sangat kurang akibat lingkungan yang tidak bersih. Kenyataan seperti ini tidak dapat dihindari, penempatan MCK tidak tepat, MCK dibangun tidak dilengkapi sarana air bersih penunjang, sehingga oleh warga dengan pertimbangan kebersihan lingkungan MCK tersebut ditutup. MCK tersebut berada di lingkungan Dusun Kamelanta Desa

Barangka. Bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) pada prinsipnya seluruh masyarakat yang mendapat bantuan dari Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sangat merasakan manfaatnya dan bersyukur karena manfaat yang dirasakan dapat merubah polah hidup mereka.

b. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Desa Barangka yang kedua adalah rehabilitasi rumah tidak layak huni di mana oleh Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebanyak 46 KK atau 46 unit yang tersebar di tiga dusun yaitu Dusun Ngkaniu-niu 17 KK atau 17 unit, dusun Kamelanta 29 KK atau 29 unit dan dusun Batu Banawa 10 KK atau 10 unit pembagian ini berdasarkan jumlah warga miskin yang terbesar di masing-masing dusun, seperti yang dituturkan warga miskin yang menerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni berikut ini;

“Saya sangat terbantu dengan bantuan rehabilitasi rumah saya sebab untuk merehab sendiri tidak mungkin saya tidak punya uang dan tidak akan keluar dari kemiskinan kalau tidak ada pelayanan kepada warga miskin”.

Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni sangat dirasakan manfaatnya hal ini disadari bahwa untuk merehab sendiri tidak mungkin sebab tingkat ekonomi yang sangat rendah untuk itu bantuan seperti ini sangat diharapkan dan dapat berkelanjutan seperti yang dituturkan warga miskin penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni berikut ini;

“Bantuan ini sangat berguna untuk saya dan kami warga miskin tidak akan keluar dari kemiskinan jika bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) tidak ada, sehingga rumah saya sekarang ini sudah berubah dan saya hidup lebih aman setelah rumah saya direhabilitasi”

Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni selanjutnya dituturkan warga miskin dusun Ngkaniu-niu Desa Barangka yang mendapat bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni berikut ini;

“Dengan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang diberikan oleh program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) desa Barangka, saya sangat bersyukur sudah menepati rumah yang berbeda dengan yang dulu sebab kalau tidak ada bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) saya tidak mungkin bisa memperbaiki rumah saya, karena saya sendiri tidak mempunyai penghasilan yang memadai untuk hal itu, oleh sebab itu saya sangat merasakan manfaat bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dapat merubah kehidupan saya terutama rumah saya”.

Jika melihat beberapa pernyataan yang dituturkan oleh warga miskin yang mendapat bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni melalui program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sangat besar manfaatnya dan bantuan seperti itu sangat dibutuhkan serta berpengaruh terhadap tingkat kehidupan mereka.

Seperti tampak pada gambar/Foto berikut ini;



Gambar/Foto 4.5 Perumahan warga miskin yang mendapat bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni dari Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)

Berdasarkan gambar/foto di atas sebagian besar rehabilitasi rumah tidak layak huni berada di pesisir pantai dan sebagian berada di tepi jalan poros Baubau

Kapontori. Warga miskin yang mendapat rehabilitasi rumah tidak layak huni bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan.

c. Pembuatan Sarana Jalan Lingkungan

Desa Barangka yang terdiri dari tiga dusun yaitu Dusun Ngkaniu-niu, Dusun Kamelanta dan Dusun Batu banawa ketiga dusun tersebut memerlukan sarana jalan penghubung antara lingkungan dengan tujuan untuk mempermudah warga dalam melakukan kegiatan antar dusun di mana infrastruktur yang dibangun melalui bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) terutama sarana jalan, saat ini sudah dirasakan manfaatnya seperti dituturkan warga miskin penerima bantuan manfaat sarana jalan lingkungan berikut ini;

“Sarana jalan lingkungan yang dibangun melalui bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sudah sesuai dengan kebutuhan khususnya saya sebagai warga miskin sebab warga miskin tidak akan ada perubahan jika tidak menerima bantuan, dan tidak akan keluar dari kategori miskin”.

Sehubungan dengan hal tersebut dituturkan waraga miskin penerima bantuan manfaat sarana jalan lingkungan berikut ini;

“Bantuan jalan lingkungan dapat mempermudah mobilitas warga terutama arus transportasi warga miskin tidak akan lancar dan terganggu karena jalan sangat becek jika musim hujan”.

Sehungan dengan beberapa hal yang dituturkan warga miskin penerima manfaat bantuan jalan lingkungan tersebut maka bantuan yang diberikan melalui Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sangat membantu kelancaran arus barang dan jasa dilingkungan tersebut sehingga seluruh kebutuhan warga miskin dapat dipenuhi. Sarana jalan seperti yang nampak pada gambar dibawah ini adalah merupakan salah satu sarana jalan sepanjang 400m yang dibuat oleh program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) tahun 2007.

Seperti tampak pada gambar/Foto berikut ini;



Gambar/Foto 4.10 Sarana jalan lingkungan yang dibuat oleh Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang diperuntukan bagi warga miskin.

Berdasarkan gambar/Foto di atas bahwa sarana jalan yang tampak di atas berada pada Lingkungan Dusun Ngkaniu-niu Dasa Barangka. Sarana jalan lingkungan ini hanya dapat menghubungkan rumah warga dalam satu lingkungan saja, sementara manfaatnya sangat besar bagi warga khususnya warga dusun Ngkaniu-niu yang dilalui oleh jalan tersebut seperti dituturkan warga miskin penerima manfaat bantuan jalan lingkungan berikut ini;

“Pembuatan jalan lingkungan menurut saya sangat bagus dan besar manfaatnya sebab jalan yang ada ini jika musim kemarau berdebu dan jika musim hujan sangat becek tidak dapat dilalui pejalan kaki terlebih lagi kendaraan roda dua untuk itu jika tidak ada bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) khususnya sarana jalan tidak akan lancar pengangkutan barang dagangan untuk dibawa kepasar”.

Berdasarkan penuturan warga miskin tersebut betapa pentingnya dan besar manfaatnya bagi warga miskin yang telah merasakan manfaat jalan tersebut. Lebih

lanjut dituturkan warga miskin penerima bantuan manfaat sarana jalan lingkungan berikut ini;

“Jalan lingkungan sangat besar manfaatnya mengurangi jalan berlumpur jika musim hujan tiba namun ke depan saya harap agar seluruh lingkungan mendapatkan jalan seperti ini”

Beberapa penuturan warga miskin penerima manfaat bantuan sarana jalan lingkungan bahwa manfaatnya sangat besar dan bukan hanya warga miskin juga masyarakat lain.

d. Pengadaan Lampu penerangan lingkungan

Pengadaan lampu penerangan lingkungan merupakan program ke empat Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Desa Barangka. Lampu penerang lingkungan tepat berada di tepi jalan lingkungan yang dibuat melalui Proyek penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP), Lampu penerang lingkungan berjumlah 60 unit dan sangat efektif pemanfaatannya. seperti yang dituturkan Anggota BPD Desa Barangka berikut ini;

“Saya sebagai Anggota BPD Desa Barangka sangat mendukung dan berterima-kasih atas program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dengan membangun infrastruktur yang menyentuh warga miskin, menurut saya ini sangat tepat sesuai dengan tujuan dan sasaran Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)”.

Lampu penerang lingkungan sangat besar manfaatnya di mana pada jalur ini ramai kegiatan masyarakat terutama bagi warga yang beraktifitas di laut pada malam hari, seperti yang dituturka oleh warga miskin yang menerima manfaat bantuan lampu penerang lingkungan berikut ini;

“Lampu penerang lingkungan sangat bermanfaat buat saya karena aktifitas saya kebanyakan di malam hari karena saya sebagai nelayan, sebelum ada bantuan lampu penerang lingkungan sangat gelap gulita bila saya pulang dari laut pada tengah malam”

Senada dengan hal yang dituturkan tersebut dan mengingat Jalur jalan sangat gelap jika malam hari sehingga Proyek Penanggulangan Kemiskinan di

Perkotaan (P2KP) memandang perlu mengadakan lampu penerang seperti yang tampak pada gambar/foto di bawah ini. Lampu penerang lingkungan ini merupakan salah satu dari 60 unit yang telah diselesaikan dan manfaatnya sangat dirasakan oleh warga. Lampu penerang jalan lingkungan seperti yang tampak pada gambar/foto berikut ini sangat dirasakan manfaatnya seluruh warga Desa Barangka bukan saja warga mis kin juga masyarakat pada umumnya.

Seperti tampak pada gambar/Foto berikut ini;



Gambar/Foto 4.10 Sarana lampu penerang lingkungan lingkungan yang dibuat oleh Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang diperuntukan bagi warga miskin

Berdasarkan gambar/Foto di atas, sarana lampu penerang lingkungan sangat didambakan oleh masyarakat baik masyarakat mampu terlebih lagi masyarakat miskin seperti yang dituturkan oleh warga miskin sebagai penerima manfaat bantuan sarana lampu penerang lingkungan berikut ini;

“Walaupun lampu ini bukan dirumah saya tetapi saya sangat terbantu dengan lampu penerang lingkungan dimana sebageian besar kegiatan dilaut dan saya lakukan pada malam hari lagi lampu ini terpasang tepat pada jalan menuju laut”

Hal senada dituturkan oleh pengurus P2KP yaitu koodinator BKM berikut ini;

“Warga desa Barangka bersyukur karena tadinya jika berjalan malan dalam keadaan gelap sekarang sudah bebas pulang pergi ke laut karena sudah ada lampu penerang jalan”.

Kondisi seperti ini sudah lama dinantikan oleh warga miskin, uluran tangan pemerintah sangat diharapkan sebab untuk mengadakan sendiri tidak mungkin seperti yang dituturkan oleh warga miskin yang mendapat manfaat bantuan lampu sarana jalan berikut ini;

“Bahwa bagi saya bantuan lampu penerang jalan ini sangat membantu dalam kegiatan saya sebab di jalan lingkungan warga miskin seperti saya tetap gelap sehingga arus transportasi warga miskin terhambat untuk saya itu mengatakan tepat sasaran”.

Senada dengan yang dituturkan warga miskin penerima bantuan lampu penerang lingkungan berikut ini;

“Lampu jalan sangat membantu lalu lalang di malam hari untuk kegiatan yang dapat meningkatkan taraf hidup kami sebab jika tidak ada lampu penerang ini kegiatan seharusnya dapat dikerjakan di malam hari maka kami lakukan di siang hari misalnya seperti mempersiapkan perangkat budi daya rumput laut”.

Berdasarkan pada penututuran beberapa informan di atas baik warga miskin peberima manfaat bantuan lampu penerang jalan lingkungan maka jelas bahwa bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) khususnya sarana lampu penerang lingkungan sangat membantu dalam mobilitas warga untuk menunjang kegiatan sehari-hari terutama pada malam hari dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan mereka.

e. Pengadaan Sarana/bak penampungan Air Bersih

Pengadaan bak penampungan air bersih melalui program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) untuk menanggulangi bila air tidak mengalir akibat kondisi alam. Bak penampungan air bersih yang diadakan oleh Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dengan sasaran warga miskin untuk mempermudah mendapatkan air bersih ketika air tidak mengalir akibat pipa yang putus diterjang banjir dan tumbangnya pepohonan dimana perbaikannya memerlukan 3 sampai dengan 5 hari dan sangat meresahkan masyarakat. Seperti yang dituturkan warga miskin yang menerima bantuan manfaat pengadaan bak penampungan air bersih berikut ini;

“Bak penampungan air bersih yang diadakan melalui Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sangat membantu warga masyarakat sehingga kebutuhan air bersih selama air tidak mengalir akibat gangguan alam masih dapat terpenuhi”

Bak penampungan air bersih yang diadakan melalui Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Desa Barangka, karena posisi Desa Barangka yang terdiri dari tiga dusun sangat jauh dari jangkauan air bersih jika pipa sebagai wadah penyaluran air bersih bocor, untuk menanggulangi hal tersebut melalui Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) memprogramkan pengadaan bak penampungan air bersih untuk memudahkan warga miskin mendapatkan air bersih yang merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. seperti yang dituturkan warga miskin yang mendapat manfaat bak penampungan air bersih berikut ini;

“Saya sebelum adanya sarana bak penampungan air bersih diadakan oleh Proyek Penanggulangan Kemiskinan di perkotaan (P2KP) saya sangat jauh berjalan untuk mendapatkan air bersih tetapi sekarang saya tidak berjalan jauh lagi bahkan air tidak mengalir pun selama beberapa hari saya masih terbantu dengan adanya bak air ini. Saya pada biasanya satu hari itu hanya gunakan waktu untuk ambil air tapi sekarang satu hari diasamping ambil air juga sudah bisa kerjakan yang lain untuk menunjang kehidupan saya”.

Sehubungan dengan apa yang dituturkan beberapa orang warga miskin di atas pada dasarnya pemerintah sudah selayaknya memikirkan bantuan seperti ini sehingga masyarakat dapat merubah kehidupannya sekaligus dapat meningkatkan taraf hidupnya, seperti yang dituturkan warga miskin sebagai penerima manfaat bantuan sarana pengadaan penampungan air bersih berikut ini;

“Dengan seringnya hujan turun di mana posisi pipa yang melewati sungai maka hal ini sangat rentan dengan kebocoran dan putusnya pipa untuk itu saya sangat terbantu dan saya sudah rasakan beberapa kali pipa air putus tapi saya masih cukup kebutuhan air bersih selama perbaikan pipa”

Senada dengan penuturan di atas maka peneliti temukan di lapangan seperti itu pula adanya sebab di desa Barangka sering sekali air tidak mengalir akibat hujan deras yang mengakibatkan pipa air bersih yang melewati kali sering diterjang banjir yang mengakibatkan putus, sebab air yang ada ini tidak didorong oleh mesin akan tetapi mengalir secara alami untuk itu perlu adanya bak penampung air seperti yang tampak pada gambar/foto berikut ini;



Gambar/Foto 4.11 Bak penampung air bersih yang dibangun oleh Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang diperuntukan bagi warga miskin.

Berdasarkan gambar/Foto tersebut di atas bahwa pengadaan bak penampung air bersih melalui Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sangat penting untuk membantu warga ketika air tidak mengalir akibat masalah teknik.

Bak penampungan air bersih yang diadakan melalui Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) seperti tampak pada gambar/foto tersebut di atas berada di dusun Ngkaniu-niu Desa Barangka yang merupakan salah satu bak penampungan air bersih dari tiga buah yang diadakan melalui Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang tersebar di tiap dusun.

Bak penampungan air bersih yang diadakan melalui bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) masih sangat sedikit jumlahnya jika dibandingkan dengan luas wilayah Desa Barangkan yang terdiri dari 3 dusun

yang hanya memiliki 1 bak penampungan air bersih dalam 1 dusun, seperti yang dituturkan warga miskin penerima manfaat bantuan pengadaan bak penampungan air bersih berikut ini;

“Bak penampungan air yang diadakan melalui Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) masih kurang namun demikian dengan adanya bak penampungan air bersih saya sudah sangat terbantu walaupun untuk mengambil air dalam waktu-waktu tertentu harus antri menunggu giliran untuk bisa mengambil air untuk mandi maupun kebutuhan lainnya apalagi pada waktu sore hari”

Bak penampungan air bersih yang diadakan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) tersebut diperuntukan kepada warga miskin sebanyak lima sampai dengan enam kepala keluarga, namun pada kenyataannya semua warga dapat menggunakannya. Bak penampungan air bersih yang tampak pada gambar/foto di atas adalah berada di Dusun Ngkaniu-niu Desa Barangka Kecamatan Kapontori yang merupakan Program Bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan tahun 2007.

Bak penampungan air bersih sangat dirasakan manfaatnya oleh semua orang karena letaknya berada di tepi jalan poros Baubau Kapontori.

Seperti yang dituturkan warga miskin penerima manfaat bantuan pengadaan bak penampungan air bersih berikut ini;

“Saya sangat terbantu dengan adanya program bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), hidup saya bisa lebih baik sebab jika tidak ada bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) khususnya bak penampungan air bersih saya tidak bisa mencuci dan sulit mendapatkan air minum. Untuk itu bak penampungan air bersih sangat bermanfaat bagi saya khususnya dan masyarakat pada umumnya”

Sehubungan beberapa penuturan warga miskin penerima manfaat pengadaan bak penampungan air bersih maka bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sangat dirasakan manfaatnya. Bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) baik bantuan langsung maupun

tidak langsung sangat berdampak positif dan sangat dirasakan manfaatnya baik penerimaan bantuan yang langsung menyentuh warga miskin maupun hanya menerima manfaatnya. Sejalan dengan hal tersebut Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) warga Desa Barangka masih sangat membutuhkan bantuan tersebut yaitu dengan meningkatkan volume bantuan sehingga secara keseluruhan kebutuhan masyarakat miskin dapat terpenuhi dan pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidupnya kesejahteraan masyarakat pun dapat tercapai, seperti yang dicitatakan oleh bangsa Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 45 yaitu untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur, sejahtera baik materil maupun spirituil.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bantuan Program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) bagi warga miskin Desa Barangka Kecamatan Kapontor Kabupaten Buton belum efektif karena penyaluran bantuan Program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) bagi warga miskin Desa Kecamatan Kapontori belum sepenuhnya dapat menjangkau seluruh warga miskin yang membutuhkan karena keterbatasan dana bantuan yang tersedia.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP):
 - a. Belum sepenuhnya memahami tujuan dan manfaat Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan.
 - b. Terbatasnya dana yang tersedia sehingga tidak mencakup seluruh warga desa yang menjadi sasaran.
 - c. Belum sepenuhnya terserap oleh masyarakat selaku sasaran program sehingga menimbulkan sulitnya program berjalan cepat.
 - d. Kurangnya sosialisasi tentang program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan.
 - e. Kurangnya pemahaman terhadap konsep pelaksanaan program sehingga mengakibatkan masyarakat menjadi apatis terhadap program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)

B. S a r a n

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang berkaitan dengan efektifitas pelaksanaan program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dalam meningkatkan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Barangka. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Saran Teoritis

1. Pemerintah melalui program bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) diharapkan dana bantuan yang diperuntukan kepada warga miskin Desa Barangka Kecamatan Kapontori disesuaikan dengan jumlah warga miskin yang ada sehingga seluruh bantuan dapat dirasakan oleh warga miskin khususnya bantuan langsung (bantuan modal usaha dan rehabilitasi rumah tidak layak huni).
2. Kelembagaan BKM perlu dipikirkan dengan mencermati segenap potensi sumberdaya yang ada sehingga upaya BKM dalam menaggulangi kemiskinan berjalan secara efektif dan tepat sasaran.
3. Perlu terus dilakukan sosialisasi dan kajian tentang identifikasi kebutuhan masyarakat agar tujuan program benar-benar tepat sesuai kebutuhan masyarakat miskin dan perlu dipahami masyarakat secara umum dan tidak adanya salah pengertian antara sesama anggota masyarakat.
3. Program yang disusun sebaiknya memperhatikan skala prioritas tentang kebutuhan masyarakat miskin dan sasaran utama Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), sehingga tujuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dapat terwujud.

2. Saran Praktis

1. Program non fisik perlu diperbanyak jumlah bantuannya dan program pembangunan fisik dikurangi sebab banyak warga miskin yang belum tersentuh dengan bantuan non fisik atau bantuan langsung.
2. Kenyataan yang kongrit diungkapkan oleh warga miskin dalam penelitian ini harus menjadi bahan kajian bagi BKM untuk menyempurnakan program kerja selanjutnya sehingga pelaksanaan program tersebut tepat sasaran.
3. Sebaiknya pelaksanaan program bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dapat menyentuh seluruh warga miskin sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial.
4. Pelaksanaan Program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dalam pengelolaannya harus transparan dan dapat diketahui oleh seluruh warga miskin.

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Arif, Sritua, 1998. *Pembangunan dan ekonomi Indonesia*. Jakarta : CPSM.
- Arikunto, Suharsimi, 1993. *Prosedur penelitian, suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Brenan, Julia, 1997. *Memandu metode kualitatif dan kuantitatif*. Yogyakarta: Balai Pustaka.
- Buchori, Mochtar, 1993. *Riset partisipatoris, riset pembaharuan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Chambers, Robert, 1987. *Pembangunan Desa mulai dari belakang*. Jakarta: LP3ES
- Dewantoro, Awan Setyo, 1995. *Kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Dwiyanto, dkk, 2003. *Reformasi tata pemerintahan dan otonomi daerah*. Yogyakarta: PSKK UGM.
- Dwiyanto, Agus, 2005. *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Yogyakarta: PSKK UGM-PEG Usaid- Bank Dunia.
- Effendi, Noer Tajudi, 1995. *Sumberdaya Manusia Peluang Kerja dan kemiskinan*. Tiara Wacana Jogyakarta.
- Hagul, Petter, 1986. *Pembangunan Desa dan LSM*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hardiman, Margaret and James Migley, 1982. *The sosial dimension of development*. New York: John and Sons Ltd.
- Hilhorst, JGM dan Kakter, M, 1985. *Sicial development in the thaird world*. Croom Helm, Sydney, Dover, New Hampshire.
- Ibrahim, Amim, 2004. *Pokok-pokok analisis kebijakan publik*. Bandung: Mandar Maju.
- Irwan, Prasetya, 2006. *Metodologi penelitian administrasi*. Jakarta: UT. Pusat Jakarta.
- Islamy, Irfan, M, 1984. *Prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

- Iswanto, Yun, 2005. *Manajemen sumberdaya manusia*. Jakarta: UT. Pusat Jakarta
- Jakop, Vrederbeg, 1986. *Metode dan tehnik penelitian*. Jakarta: Gramedia.
- Karta sasmita Ginajar, 1996. *Pembangunan Untuk rakyat*. Jakarta: CIDES.
- Korten, C, David dan Sjahrir. 1988. *Pembangunan berdimensi kerakyatan*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Lindyastuti, 1996. *Budaya kemiskinan didaerah tertinggal*. Daerah Istimewa Yogyakarta: CV. Bupara Nugraha Jakarta.
- Milles, B, Mattew dan Hubberman, A. Michael. 1992. *Analisis data kualitatif*. Jakarta: Uversitas Indonesia.
- Moleong, lexy, 2000. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung, PT. Rajawali Rosdakarya.
- Morisan, 2004. *Pemerintah daerah Undang-Undang (UU) no. 32 tahun 2004 beserta penjelasannya*. Jakarta: Ramdina Prakarsa.
- Mubyarto, 2000. *Pemulihan ekonomi rakyat menuju kemandirian masyarakat desa*. Yogyakarta: Aditya Media/YAE.
- J, Nasikun, 2004. *Sistem sosial Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nasution, 1988. *Metode penelitian naturalistik kualitatif*. Bandung: Taristo.
- Nawawi, H, 1998. *Metode penelitian bidang sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Parson, Wayne, 2005. *Publuic policy pengantar teori dan praktek analisis kebijakan*. Jakrta: Kencana.
- Chalid, Pheni, 2006 *Teori dan isu pembangunan*. Jakarta : UT Pusat.
- Prajoso, 2003. *Pemerintah Daerah*. Jakarta: UT Pusat
- Ramahdan, 2005. *Metodologi Penelitian adminstrasi*. Jakarta: UT Pusat.
- Riant, Nugroho, 2007. *Analisis kebijakan*. Jakarta: PT. Alex Media Komputido.
- Raharjo, 2006. *Metodologi penelitian administrasi*. Jakarta: UT Pusat.
- Soetomo, 2006. *Strategi-strategi pembangunan masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta Bandung

- Siahaan, N.H.T.2006. *Hukum Lingkungan*. Jakarta:Pancuran Alam
- Sujana, 1992. Tehnik analisis registrasi dan korelasi bagi para peneliti. Bandung : Tarsito
- Suparjan, Suyatno Hempri, 2003. *Pengembangan masyarakat dari pembangunan samapai pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Mediya.
- pembangunan masyarakat. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Tjiptoheryanto, Projono, 1987. *Perspektif dalam pembangunan Nasional*. Jakarta: Fakultas Ekonomi.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, 1995. *Politik pembangunan sebuah arah, konsep dan strategi*. Yogyakarta: Tiara wacana.
- UL Haq, Mahbub, 1995. *Tirai kemiskinan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

2. Sumber lain

- Arianto., 2003. *Urban poverty project P2KP Direktorat Jenderal Perumahan dan Pemukiman Departemen Pemukiman dan Prasarana wilayah*. Pedoman Umum.
- Direktorat Jenderal Departemen Sosial. 2003. *Buku 1 pedoman umum P2KP*. Jakarta: Departemen Sosial.
- Hamdan Hazinuddin, 2003. *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Tesis Program Pasca Sarjana UGM.
- Heeruman, Herman, *Pokok-pokok pemikiran kebijakan dan penanggulangan kemiskinan di perkotaan*. Makalah tidak diterbitkan, tidak bertahun.
- Lambang Triono, 2002. *Strategi pemberdayaan masyarakat menuju Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Makalah UGM.
- Mahrudin, 2007. *Kontroversi Keputusan dalam pembangunan menara persatuan dan sarana prasarana MTQ Nasional XXI Propinsi Sulawesi Tenggara*. Yogyakarta: Tesis Pasca Sarjana UGM.
- Nashier, 2001. *Media Partisipatif*
- Nilakrisna, Dewi, 2002. *Implentasi kebijakan pendaftaran penduduk di Kota Jambi*.

Yogyakarta: Tesis Pasca Sarjana UGM.

Pemerintah Desa Barangka. 2007-2008. *Monografi Desa Barangka*.

Pemerintah Desa Barangka. 2007-2008. Program Jangka Menengah (PJM).

Sumodiningrat, Gunawan, 1998. *Stabilitas ekonomi dan jaring pengaman sosial, mewujudkan kesejahteraan rakyat*. Konsbang: Makalah

Suparian, P, (Ed),1995. *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

UNIVERSITAS TERBUKA

PEDOMAN WAWANCARA

Mengapa Desa barangka terpilih sebagai penerima bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)?

.....
.....

Apakah mengajukan usulan penerima bantuan atau dayang begitu saja?

.....
.....

Apakah bantuan yang diberikan sudah memenuhi kebutuhan warga miskin?.....

.....

Mengapa dalam pelaksanaan bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) lebih banyak bantuan tidak langsung dibanding dengan bantuan langsung?

.....
.....

Apakah pemebrian bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sudah dengan data warga miskin di Desa Barangka?

.....
.....

Apa komentar warga miskin terhadap bantuan yang diterima melalui Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)?

.....
.....

Apakah ada faktor yang merupakan hambatan bagi pelaksanaan program bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) khususnya dalam memberikan bantuan kepada warga miskin?

.....
.....

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
Jl. Cabe Raya Pondok Cabe Ciputat 15418
Telp. 021,7415050,Fax 021,7415588

BIODATA

Nama : Amiruddin
Tempat Tanggal Lahir : Muna, Tahun 1967
Registrasi Pertama : 2007.1
Riwayat Pendidikan : - SD Negeri 1 Ereke tahun 1975
- SMP Negeri 3 Bau-Bau tahun 1980
- SMA Negeri 2 Bau-Bau tahun 1986
- Universitas Patimura Ambontahun 1988
Riwayat Pekerjaan : Guru SMA Islam Ternate tahun 1995
: Guru SMA Negeri 2 Ternate tahun 1996
: Wakil Kepala SMP Negeri 2 Kapontori tahun 2000-
2004
: Kepala SMA Swasta Kambero 2000- 2006
: Kepala SMA Negeri 1 Kapontori 2006-2009
: Pengawas Dinas Pendidikan 2009 hingga sekarang
Alamat Tetap : Desa Mabalugo Kecamatan Kapontori Kabupaten
Buton
Hp. : 085241511063

.....2012

Amiruddin

NIM,014966179

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
Jl. Cabe Raya Pondok Cabe Ciputat 15418
Telp. 021,7415050,Fax 021,7415588

Kepada

Yth, Direktur PPs UT

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe

Tangerang 15518

Yang bertandatangan di bawah ini, saya selaku Pembimbing TAPM dari mahasiswa:

Nama / NIM : Amiruddin / 014956179

Judul TAPM : Efektifitas Pelaksanaan Proyek

Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan
(P2KP) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan
Masyarakat Di Desa Barangka Kecamatan
Kaponori Kabupaten Buton.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa TAPM dari mahasiswa yang bersangkutan sudah selesai 100% sehingga dinyatakan *sudah layak uji* dalam Ujian Sidang Tugas Akhir Program Magister (TAPM).

Demikian keterangan di ini untuk menjadikan periksa

Pembimbing I,

Kendari, 12 Juli 2011

Pembimbing II

Prof.Dr.Wempy Banga.M.Si
NIP.

Dr.Hasanuddin Bua,SE.Ms

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
Jl. Cabe Raya Pondok Cabe Ciputat 15418
Telp. 021,7415050,Fax 021,7415588

PENDEFTARAN UJIAN SIDANG

Nama : Amiruddin
NIM : 014966179
Program : Magister Adminstrasi Publik
Alamat : Desa Mabulugo Kec. Kapontori Kab. Buton
HP : 085241511063
Judul TAPM : Efektifitas Pelaksanaan Proyek Penanggulangan
Kemiskinan

di Perkotaan (P2KP) Dalam Peningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Barangka Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton.

Persyaratan : a. LKAM
b. Keterangan TAPM layak uji dari Pembimbing
c. Bukti Setoran Pembayaran Biaya Ujian Sidang
d.TAPM rangkap 5 (lima)

Permintaan Waktu Pelaksanaan Ujian Sidang:

Hari :
Tanggal :
Waktu : Pukul

Kendari,.....2012

Pembimbing I,
mendaftar

Yang

Prof.Dr. Wempy Banga.M.Si
Amiruddin
NIP.
NIM,014966179

Pembimbing II

KENDARI

Mengetahui
Kepala UPBJJ UT

Dr. Hasanuddin Bua,SE.MS

Drs. Wawan Ruswanto,M.Si

NIP

NIP.1630715 199103 1 006

**Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian
Desember sampai dengan Pebruai 2009**

No	Tahapan Kegiatan	W a k t u											
		Desmber			Januari			Februari					
1	Penyusunan Proposal	✓	✓										
2	Seminar Proposal			✓									
3	Penelitian				✓								
4	Pengumpulan Data					✓							
5	Pengolahan Data					✓							
6	Seminar Hasil						✓						
7	Ujian Tesis												✓

UNIVERSITAS TERBUKA